



**PEMERINTAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 33 TAHUN 2023**

**RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2024**

SARILAMAK, DESEMBER 2023



SALINAN

BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.
10. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Pasal 2

Maksud penyusunan Renja PD adalah untuk :

- a. menjabarkan Program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2024 sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing PD; dan
- b. menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan Program, kegiatan, dan sub kegiatan masing-masing PD untuk tahun 2024.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renja PD adalah untuk :

- a. memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf PD dalam melaksanakan Program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024;
- b. menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada masing-masing PD; dan
- c. menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD tahun 2024.

Pasal 4

(1) Renja PD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. bab I memuat pendahuluan;
- b. bab II memuat hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
- c. bab III memuat tujuan, sasaran, Program dan kegiatan;
- d. bab IV memuat rencana kerja dan pendanaan PD; dan
- e. bab V memuat penutup.

(2) Renja PD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan rincian sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
2. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Rencana Kerja Inspektorat;
4. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
5. Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran;
9. Rencana Kerja Dinas Sosial;
10. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

13. Rencana Kerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
14. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
15. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Rencana Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga;
17. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari;
18. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
19. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman;
20. Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan;
21. Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
22. Rencana Kerja Dinas Perikanan;
23. Rencana Kerja Dinas Pangan;
24. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
25. Rencana Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan;
26. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
27. Rencana Kerja Badan Keuangan;
28. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
29. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
30. Rencana Kerja Kecamatan Gunuang Omeh;
31. Rencana Kerja Kecamatan Bukik Barisan;
32. Rencana Kerja Kecamatan Suliki;
33. Rencana Kerja Kecamatan Guguak;
34. Rencana Kerja Kecamatan Mungka;
35. Rencana Kerja Kecamatan Akabiluru;
36. Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh;
37. Rencana Kerja Kecamatan Luak;
38. Rencana Kerja Kecamatan Lareh Sago Halaban;
39. Rencana Kerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari;
40. Rencana Kerja Kecamatan Harau;
41. Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
42. Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX.

- (3) Renja PD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala PD menyusun Renja PD Tahun 2024 dengan berpedoman kepada RKPD Tahun 2024 dan Rencana Strategis PD.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penjabaran dari RKPD.

Pasal 6

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD dilakukan oleh masing-masing Kepala PD.

Pasal 7

Perubahan Renja PD Tahun 2024 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 14 Desember 2023

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

ttd

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO


Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 14 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd

HERMAN AZMAR
BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2023 NOMOR 33

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. LIMA PULUH KOTA


ERI FORTUNA, SH
NIP.19660104199303 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 33 TAHUN 2023
TANGGAL : 14 DESEMBER 2023
TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

1. Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
2. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Rencana Kerja Inspektorat;
4. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
5. Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran;
9. Rencana Kerja Dinas Sosial;
10. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Rencana Kerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
14. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
15. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Rencana Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga;
17. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari;
18. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
19. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman;
20. Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan;
21. Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
22. Rencana Kerja Dinas Perikanan;
23. Rencana Kerja Dinas Pangan;
24. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
25. Rencana Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan;
26. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
27. Rencana Kerja Badan Keuangan;
28. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
29. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
30. Rencana Kerja Kecamatan Gunuang Omeh;
31. Rencana Kerja Kecamatan Bukik Barisan;
32. Rencana Kerja Kecamatan Suliki;
33. Rencana Kerja Kecamatan Guguak;
34. Rencana Kerja Kecamatan Mungka;
35. Rencana Kerja Kecamatan Akabiluru;
36. Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh;
37. Rencana Kerja Kecamatan Luak;
38. Rencana Kerja Kecamatan Lareh Sago Halaban;
39. Rencana Kerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari;
40. Rencana Kerja Kecamatan Harau;
41. Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
42. Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX.

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 dapat terselesaikan sesuai dengan ketentuan yang ada. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja ini disusun dengan mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 dan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026. Lebih dari itu program dan kegiatan tersebut disempurnakan dengan adanya usulan dari para pihak terkait pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Rencana Kerja yang telah disusun ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024. Selain itu, dokumen ini juga menjadi alat ukur (*review*) sejauh mana pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian kinerja tahun berjalan. Lebih jauh lagi, Rencana Kerja ini diharapkan dapat memberikan kejelasan, panduan dan manfaat bagi institusi pemerintah, mitra kerja, maupun masyarakat secara umum dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang turut mendukung terselesainya penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun Badan Kesbangpol Tahun 2024. Semoga semua yang tertuang dalam dokumen ini dapat terlaksana dan menjadi acuan untuk tahap pembangunan selanjutnya.

Payakumbuh, Juli 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lima Puluh Kota



H. JONI AMIR, S. Sos, MM
NIP. 19650619 199003 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 (batang tubuh)	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-10
1.3 Maksud dan Tujuan	I-14
1.4 Sistematika Penulisan	I-15
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesbang Pol Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Kesbangpol.....	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol	II-22
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol.....	II-24
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II-32
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-53
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	III-1
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota	III-1
3.1.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.1.2 Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi Sumatera Barat ...	III-2
3.1.3 Telaahan terhadap Kebijakan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	III-3
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Renja Badan Kesbangpol	III-4
3.3 Program dan Kegiatan.....	III-6
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	IV-1
BAB V PENUTUP	V-1
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kalender Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Tahun 2024	I-3
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol dan Pencapaian Renstra Badan Kesbangpol s/d Tahun 2023	II-3
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	II-31
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun Anggaran 2024	II-35
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan	II-72
Tabel 3.1	Identifikasi permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Badan Kesbangpol	III-6
Tabel 3.2	Program dan Kegiatan urusan Pemerintahan Umum	III-8
Tabel 3.3	Program dan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	III-10
Tabel 3.4	Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kesbangpol Tahun 2024	III-11
Tabel 4.1	Uraian Rencana Kerja Menurut Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kesbangpol Tahun 2024	IV-2
Tabel 4.2	Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan Jumlah Program dan Kegiatan Tahun 2024.....	IV-19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan	I-9
------------	--	-----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana kerja (renja) dimaksudkan sebagai suatu dokumen perencanaan kerja dan anggaran dalam satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja Kesbangpol memuat keadaan masa depan yang ingin diwujudkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota disertai sejumlah sasaran strategis yang harus dicapai dalam rangka mengemban misi serta mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pemerintah daerah bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026.

Sesuai dengan lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang penyusunan rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) dalam hal ini Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disusun berdasarkan surat edaran Bupati Lima Puluh Kota perihal penyampaian rancangan Renja Organisasi Perangkat Daerah. Surat edaran Bupati tersebut dikeluarkan setelah pembahasan agenda penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), pelaksanaan forum Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan musyawarah perencanaan pembangunan daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rancangan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disusun dengan teknik pengolahan data dan informasi melalui analisis gambaran pelayanan Organisasi Perangkat Daerah. Dalam rancangan Rencana kerja juga direview hasil evaluasi Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah meliputi isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta perumusan tujuan dan sasaran.

Sebagai komponen pemerintah daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki peran penting dalam mewujudkan iklim kehidupan bangsa yang

demokratis, dinamis, tenteram dan damai berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024 disusun dengan mengedepankan aspek prioritas terhadap program dan kegiatan yang menjadi urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun pertama dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 – 2026. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 - 2026 disusun untuk memenuhi target program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 juga berbasiskan pada rencana program dan kegiatan Kementerian Dalam Negeri dan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Tahapan dan proses penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota adalah berdasarkan Lampiran IV Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dibuat oleh Tim Penyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah. Tim tersebut telah dibentuk melalui keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 905//333/BUP-LK//XII/2022 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima puluh Kota Dalam Formasi Jabatan Ex-Officio.

Selanjutnya sesuai dengan keputusan tersebut, proses penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 dilakukan melalui koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota dan pemangku kepentingan. Selanjutnya sesuai dengan pasal 16 ayat 2, proses penyusunan Renja melalui tahapan sebagai berikut: (i) persiapan penyusunan; (ii) penyusunan rancangan awal; (iii) penyusunan rancangan; (iv) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; (v) perumusan rancangan akhir dan (vi) penetapan. Seluruh tahapan ini dimulai pada Oktober 2022, dan akan selesai pada Juli 2023. Adapun jadwal tahapan penyusunan Renja sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 1.1

Kalender Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Tahun 2024

No	Tahapan Kegiatan	Nov 2022				Des 2022				Jan 2023				Feb 2023				Mar 2023				Apr 2023				Mei 2023				Juni 2023				Juli 2023			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV				
A.	Persiapan Penyusunan Rancangan Awal Renja 2024																																				
1.	Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja PD																																				
2.	Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja																																				
3.	Orientasi Tim Penyusun Renja Badan Kesbangpol																																				
4.	Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD																																				
B.	Penyusunan Rancangan Awal Renja 2024																																				
1.	Penyusunan Rancangan Awal Renja 2024																																				
2.	Penyempurnaan ranwal berdasarkan SE kepala daerah tentang Pedoman Penyempurnaan Ranwal Renja PD																																				

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kesbangpol Lima Puluh Kota Tahun 2024

No	Tahapan Kegiatan	Nov 2022				Des 2022				Jan 2023				Feb 2023				Mar 2023				Apr 2023				Mei 2023				Juni 2023				Juli 2023			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I			I	II	III	IV	I			I	II	III			
C.	Penyusunan Rancangan Renja																																				
1.	Penyusunan Rancangan Renja																																				
2.	Penyampaian Rancangan Renja kepada Bapelitbang untuk diverifikasi sebagai bahan penyempurnaan ranwal RKPD menjadi rancangan RKPD																																				
3.	Verifikasi Renja oleh Bapelitbang untuk menjamin bahwa rancangan renja Bapelitbang sudah selaras dengan rancangan awal RKPD																																				
4.	Penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja dengan mempedomani hasil verifikasi																																				
D.	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah																																				
1.	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Gabungan Perangkat Daerah oleh Badan Kesbangpol																																				

No	Tahapan Kegiatan	Nov 2022				Des 2022				Jan 2023				Feb 2023				Mar 2023				Apr 2023				Mei 2023				Juni 2023				Juli 2023			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I		I	II	III		
E.	Perumusan Rancangan Akhir Renja																																				
1.	Penyempurnaan Rancangan Renja menjadi Rankhir Renja berdasarkan Perkada RKPD																																				
F.	Penetapan Rencana Kerja																																				
1.	Penyampaian Rankhir Renja ke Bapelitbang untuk penyalarsan Renja PD dengan Perkada RKPD dan Renja PD lainnya																																				
2.	Penyempurnaan Rankhir Renja hasil verifikasi																																				
3.	Penyampaian Kembali Rankhir Renja berdasarkan hasil verifikasi ke Bapelitbang																																				
4.	Penyampaian Rankhir Renja semua OPD oleh Bapelitbang kepada KD melalui Sekda untuk ditetapkan dengan Perkada																																				
5.	Penetapan Perkada Renja OPD se Kab Lima Puluh Kota																																				

Tahap persiapan penyusunan Renja meliputi: penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD. Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, orientasi dan penyusunan agenda kerja tim difasilitasi oleh Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota. Tahapan persiapan ini dilaksanakan pada bulan Desember 2022.

Selanjutnya tahap penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Rancangan awal Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 berpedoman pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026, hasil evaluasi Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 (n-2) dan perkiraan capaian Tahun 2023 (n-1). Sesuai dengan Pasal 126 peraturan diatas, penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Desember. Sehingga untuk rancangan awal Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024, direncanakan selesai minggu pertama bulan Desember 2022. Penyusunan Renja ini berpedoman pada Renstra dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran dan prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja dengan Renstra Perangkat Daerah. Sedangkan evaluasi Renja tahun lalu dan tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja dapat mengoptimalkan pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah. Sehingga rancangan awal Renja ini mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disempurnakan dengan mempedomani Surat Edaran Kepala Daerah yang dalam hal ini adalah Surat Edaran Bupati Lima Puluh Kota Nomor 050/27/SE/BAPELITBANG-LK/II/2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024. Penyempurnaan tersebut dilakukan berdasarkan hasil verifikasi Bapelitbang terhadap rumusan rencana

program, kegiatan, sub kegiatan, indicator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran.

Tahap Ketiga dalam penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 adalah tahap penyusunan rancangan. Penyusunan rancangan merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja ini kemudian dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah. Rancangan Renja ini kemudian disampaikan ke Bapelitbang untuk diverifikasi oleh tim dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Rancangan Renja ini disampaikan ke Bapelitbang paling lambat minggu ketiga bulan Maret 2023.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 pasal 136 ayat 1, dijelaskan bahwa Forum Perangkat Daerah dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bapelitbang. Berdasarkan kesepakatan Bapelitbang dengan OPD untuk meningkatkan peran serta para pihak dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 dan pembelajaran bagi perangkat daerah dalam melaksanakan Forum, maka Forum Perangkat Daerah dilaksanakan secara mandiri oleh masing - masing Perangkat Daerah dengan supervisi dari Bapelitbang. Forum Perangkat Daerah Badan Kesbangpol ini dilaksanakan pada 23 Februari 2023. Forum Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah. Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam Forum Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Gabungan Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan akhir merupakan tahap selanjutnya dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah. Rancangan akhir Renja merupakan proses

penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Sistematika penyajian rancangan akhir Renja sama dengan rancangan awal Renja.

Tahap akhir dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah tahap penetapan. Rancangan akhir Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 disampaikan ke Bapelitbang untuk diverifikasi oleh tim, paling lambat satu minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Setelah diverifikasi dan disempurnakan kembali oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, rancangan akhir Renja diserahkan kembali ke Bapelitbang untuk diajukan penetapannya paling lambat satu bulan setelah Perkada RKPD ditetapkan.

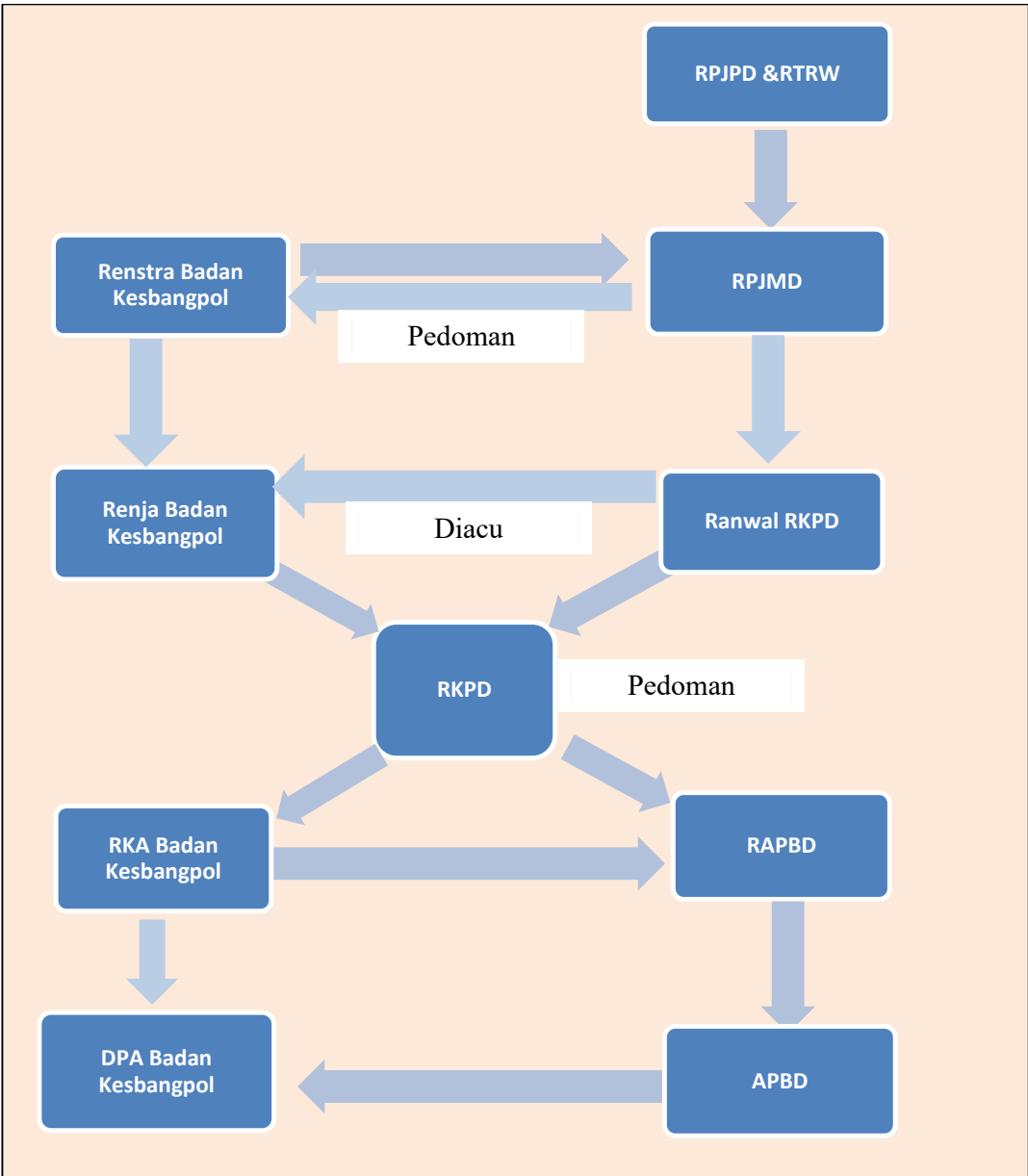
Setiap tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terlepas dari tahapan proses penyusunan RKPD Pemerintah Daerah. Rancangan awal Renja Perangkat Daerah merupakan bahan dalam penyusunan rancangan awal RKPD. Rancangan awal RKPD setelah penyempurnaan berdasarkan konsultasi publik merupakan penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kesesuaian dan keselarasannya dengan rancangan awal RKPD, merupakan bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Rancangan akhir RKPD dibahas bersama Kepala Perangkat Daerah untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja diverifikasi keselarasannya dengan perkara tentang RKPD oleh Bapelitbang, untuk selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah.

RKPD Tahun 2024 merupakan kesinambungan upaya pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah yang secara langsung atau tidak langsung akan berkontribusi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. RKPD Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun pertama RPJMD 2021-2026. RKPD ini menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026, dimana program-program yang telah ditetapkanakan disinkronkan dengan hasil Musrenbang Nagari, Kecamatan dan Kabupaten. Dengan demikian program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 diharapkan dapat memenuhi kehendak RPJMD dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Keterkaitan Rencana Kerja Badan Kesbangpol dengan dokumen perencanaan yang lain, tergambar pada diagram berikut ini:

Gambar 1.1

Hubungan Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Daerah



Selanjutnya sebagai salah satu Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024. Seperti halnya RKPD 2024, maka Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 ini akan menjadi Rencana Kerja Tahun ke-3 dan harus menjadi bagian dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026. Renja badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini selanjutnya juga akan ditindaklanjuti sebagai pedoman dalam proses penyusunan APBD yaitu, RKA, KUA/PPAS dan RAPBD.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 selanjutnya akan menjadi pedoman awal dalam penyusunan Kebijakan Umum dan Anggaran Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2024. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 merupakan rancangan awal perumusan program dan kegiatan tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang seterusnya akan dituangkan dalam rancangan Pra RKA Organisasi Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 5679) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemeintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 144);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 4).
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
25. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140);
26. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 41).

27. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 105).
28. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 15).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi dan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD sesuai dengan urusan dan kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun 2024.

Berkaitan dengan maksud di atas, Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota ditujukan untuk:

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2024.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun disusun mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut :

- I. *Pendahuluan*, yang berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Landasan Hukum maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.
- II. *Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Lalu*, yang memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Lalu (Tahun $n - 2$) dan perkiraan capaian tahun berjalan ($n - 1$) serta realisasi rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Review terhadap rancangan awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- III. *Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah*, yang memuat telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2024.
- IV. *Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah*, yang memuat uraian pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan sebagai amanat urusan Pemerintahan Umum serta Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- V. *Penutup*, yang berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan dana, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam Bab ini dimuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan rencana kerja perangkat daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun lalu, dan realisasi Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan/atau realisasi anggaran APBD untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam bagian ini, pokok-pokok materi yang disajikan antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sampai dengan Tahun Anggaran 2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan sebanyak 6 (enam) program, 11 (sebelas) kegiatan, dan 28 sub kegiatan. Diantara program dan kegiatan tersebut 5 (lima) program dan 5 (lima) kegiatan merupakan pelaksanaan unsur pemerintahan umum yang merupakan kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Selanjutnya terdapat 1 (satu) program dan 6 (enam) kegiatan yang merupakan pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan pada Sekretariat Badan Kesbangpol. Hasil Evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan tahun lalu, terdapat 2 (dua) program yang mempunyai capaian kinerja yang sesuai target, 3 (tiga) program mempunyai capaian melebihi target, dan 1 (program) tidak sesuai target. Program yang tidak tercapai tersebut adalah program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam Renja 2022 adalah 100%, dengan capaian kinerja program tahun 2022 sebesar 90,71%. Hal ini dipengaruhi oleh tidak terlaksananya pengadaan barang penunjang urusan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Pencapaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan Tahun Anggaran 2023 dapat disajikan sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1 (T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol dan Pencapaian Renstra Badan Kesbangpol s/d Tahun 2023
Kabupaten Lima Puluh Kota

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2023	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	95	95	100	105	95	97	97
2 11 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	95	95	100	105	95	97	97
2 11 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun	18	3	3	2	67	5	10	56
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
2 11 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang disusun	6	1	1	1	100	-	2	33
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD Perangkat Daerah yang disusun								
2 11 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang disusun	6	1	1	1	100	-	2	33

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kesbangpol Lima Puluh Kota Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2023	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD Perangkat Daerah yang Disusun								
2 11 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang disusun	6	1	1	1	100	-	2	33
		Jumlah Dokumen DPA SKPD Perangkat Daerah yang disusun								
2 11 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPPA yang disusun	6	1	1	1	100	-	2	33
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA Perangkat Daerah yang disusun								
2 11 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah LKJIP, LKPJ, LPPD, SPIP yang disusun	27	4	4	4	100	4	12	44
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kesbangpol Lima Puluh Kota Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2023	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 11 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi	36	4	4	4	100	4	12	33
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
2 11 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	95	95	100	105	95	97	97
2 11 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang bulan yang menerima gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	192	25	28	28	100	28	81	42
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN								
2 11 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan yang tersusun	108	18	18	18	100	-	36	33
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
2 11 01 2.02 05	Koordinasi dan	Jumlah dokumen	36	1	1	1	100	17	19	53

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kesbangpol Lima Puluh Kota Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2023	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	keuangan akhir tahun Badan Kesbangpol								
2 11 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen laporan SPJ Fungsional dan Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik	144	24	24	24	100	-	48	33
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD								
2 11 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen laporan pronogsis realisasi anggaran	6	1	1	1	100	-	2	33
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kesbangpol Lima Puluh Kota Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2023	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 11 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
2 11 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daeah pada SKPD	24	2	2	4	200	2	8	33
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	95	100	105	100	100	100
2.11.01.2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah stel pakaian dinas yang diadakan	200	-	40	40	100	40	80	40
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan								
2.11.01.2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang undangan	5	-	-	-	-	-	-	0

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kesbangpol Lima Puluh Kota Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2023	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								
2 11 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	93.65	93.65	100	107	100	98	98
2 11 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket alat listrik yang diadakan	36	6	6	6	100	6	18	50
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan								
2 11 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	60	-	2	2	100	2	4	7
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan								
2 11 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah paket ATK yang	372	62	62	62	100	12	136	37

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kesbangpol Lima Puluh Kota Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2023	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kantor	diadakan jumlah jenis alat kebersihan yang diadakan								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan								
2 11 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang yang dicetak Jumlah Lembar Pengadaan	120942	20,007	20,007	20,050	239	47,867	87924	73
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan								
2 11 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pembelian Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu (porsi)	3600	600	600	434	72	600	1634	45
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu								
2 11 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah oh yang mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1200	200	200	365	183	93	658	55
		Jumlah Laporan								

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kesbangpol Lima Puluh Kota Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2023	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
2 11 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	97.96	95.00	100	105	97.96	99	99
2 11 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Roda 2 yang diadakan	16	8	-	-	0	2	10	63
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan								
2 11 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah kursi tunggu dan kursi tamu yang diadakan	12	1	-	-	0	2	3	25
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan								
2 11 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	72	5	5	5	100	6	16	22
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang						0		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kesbangpol Lima Puluh Kota Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2023	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Disediakan								
2 11 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	90.91	90.91	100	110	95	95	95
2 11 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Buku Cek yang disediakan, Jumlah Lembar Materai yang disediakan	24	12	2	2	100	2	16	67
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyura						12		
2 11 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah Kali Pembayaran Rekening Telfon, Listrik, Air, Surat Kabar dan TV berlangganan	72	12	12	12	100	12	36	50
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						12	-	-

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kesbangpol Lima Puluh Kota Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2023	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 11 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pembayaran honor Tenaga Kontrak Khusus dan Tenaga Kontrak Biasa	72	12	12	12	100	12	36	50
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						12		
2 11 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	94.20	94.20	95.00	101	100	96	96
2 11 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kali unit Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)	84	12	12	12	100	14	38	45
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						14	-	-

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kesbangpol Lima Puluh Kota Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2023	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 11 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah kali unit Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72	10	10	12	120	12	34	47
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						33	-	-
2 11 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor	6	1	1	1	100	1	3	50
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	-	-	-	-	-	1	-	-
8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase terlaksananya Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	95.34	85.00	80	100	125	85	90	94
8 01 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemantapan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	95.34	85.00	80	100	125	85	270	283

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kesbangpol Lima Puluh Kota Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2023	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah bimtek, sosialisasi, FPK, GNRM	98	5	8	7	88	8	20	20
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-	-	-	-	-	486	-	-
8 01 02 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Peringatan bela negara (lokasi)	48	7	7	5	71	8	20	42
		Jumlah Orang yang	-	-	-	-	-	225	-	-

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kesbangpol Lima Puluh Kota Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2023	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan								
8 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Sosialisasi peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air	180	-	-	-	-	10	10	6
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah					12		12	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kesbangpol Lima Puluh Kota Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2023	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Kebangsaan								
8 01 02 2.01 06	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah keluarga yang mengikuti pembentukan dan penumbuhan karakter	-	-	-	-	30	-	30	-
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara					75		75	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kesbangpol Lima Puluh Kota Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2023	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8 01 02 2.01 07	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka						12		
		Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka						1		
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik	83.00	78.01	75	100	133	78.01	85.34	103
8 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik	83.00	78.01	75	100	133	78.01	85.34	103

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kesbangpol Lima Puluh Kota Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2023	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik									
8 01 03 2.02 03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	23	1	1	2	200	1	4	17
		Jumlah Orang yang	-	-	-	-	-	300	-	-

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kesbangpol Lima Puluh Kota Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2023	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah								
8 01 03 2.02 04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah sosialisasi banpol dan verifikasi banpol	66	1	1	2	200	1	4	6

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kesbangpol Lima Puluh Kota Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2023	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-	-	-	-	-	-	75	-	-
8 01 03 2.02 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah bulan dilakukan monitoring Jumlah Kecamatan dilakukan Monitoring	72	12	12	12	100	12	36	50

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kesbangpol Lima Puluh Kota Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2023	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	di Daerah									
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	72	12	12	12	100	12	36	50
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas	83.00	81.00	75	59	197	75	78	94
8 01 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas	83.00	81.00	75	59	197	75	156	188

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kesbangpol Lima Puluh Kota Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2023	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan									
8 01 04 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah ormas yang terdaftar, dibina dan diawasi	200	30.00	30	59	197	30	119	60
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-	-	-	-	-	160	-	-
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Meningkatnya Kerukunan Umat beragama dan	85.00	81.00	75	75	100		156	184

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kesbangpol Lima Puluh Kota Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2023	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Pengawasan terhadap aliran atau Paham Keagamaan di Masyarakat								
8 01 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Meningkatnya Kerukunan Umat beragama dan Pengawasan terhadap aliran atau Paham Keagamaan di Masyarakat	85.00	81.00	75	75	100		156	184
8 01 05 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Rekomendasi / Notulen yang dihasilkan Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	144	17	75	75	100	17	92	64
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di	-	-	-	-		120	-	-

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kesbangpol Lima Puluh Kota Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2023	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah								
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Meningkatnya Kamtibmas demi terjaganya Stabilitas Nasional di Daerah	85.00	81.80	74.74	74.74	100	75	231.54	272
8 01 01 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Persentase Meningkatnya Kamtibmas demi terjaganya Stabilitas Nasional di Daerah	85.00	81.80	74.74	74.74	100	75	231.54	272

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kesbangpol Lima Puluh Kota Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2023	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sosial									
8 01 06 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Rekomendasi/Notulen yang dihasilkan	132	10	19	10	53	24	44	33
		Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi	-	-	-	-	-	560	-	-

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kesbangpol Lima Puluh Kota Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2023	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah								
8 01 06 2.01 05	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah	72	12	12	12	100	12	36	50
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	72	24	12	12	100	12	36	50

Dalam Renja Tahun Anggaran 2022, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 8.574.808.054,- (*Delapan Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Lima Puluh Empat Rupiah*) yang direncanakan akan digunakan untuk membiayai 6 program 13 kegiatan dan 42 sub kegiatan. Dari program dan kegiatan yang telah direncanakan tersebut, pada KUA PPAS Tahun 2022, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 6.375.920.796,- (*Enam Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*). Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 6 program 13 kegiatan dan 27 Sub Kegiatan.

Selanjutnya pada KUA PPAS Perubahan Tahun 2022, alokasi anggaran Badan Kesbangpol Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebesar Rp. 6.397.261.332,- (*Enam Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*). Anggaran tersebut direncanakan untuk melaksanakan 6 program 12 kegiatan dan 27 sub kegiatan. Adapun realisasi keuangan dari anggaran tersebut adalah sebesar Rp 6.055.152.371,- atau 93,63%. Dari program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten lima Puluh Kota Tahun 2022, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan rencana kegiatan sebanyak 8 kegiatan, telah dilaksanakan sebanyak 8 kegiatan pada tahun anggaran 2022, diakomodir dalam DPA sebanyak 9 Kegiatan dan DPPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 8 kegiatan. Kegiatan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

- e) Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- h) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Target kinerja program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam Renja 2022 adalah 100%, dengan capaian kinerja program tahun 2022 sebesar 90,71%.

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan rencana kegiatan sebanyak 1 (satu) kegiatan, diakomodir dalam DPA dan DPPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 sebanyak 1 (satu) kegiatan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi dan Karakter Kebangsaan. Target kinerja program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dalam Renja 2022 adalah 85%, dengan capaian kinerja program tahun 2022 sebesar 100,00%.
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, dengan rencana kegiatan sebanyak 1 (satu) kegiatan, yaitu Perumusan kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik. Target kinerja program peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik pada tahun 2022 adalah 80,00% dalam Renja 2022 dengan capaian kinerja program sebesar 98,13%.

4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan rencana kegiatan sebanyak 1 (satu) kegiatan, diakomodir dalam DPA dan DPPA Tahun 2022 sebanyak 1 (satu) kegiatan, yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Target capaian program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan sebesar 80,00%, dengan capaian kinerja program ini sebesar 100,69%.
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dengan rencana kegiatan sebanyak 1 (satu) kegiatan, diakomodir dalam DPA dan DPPA Tahun 2022 sebanyak 1 (satu) kegiatan, yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya. Target capaian program ini adalah sebesar 80,00%, dengan capaian kinerja program ini sebesar 102,50%.
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, dengan rencana kegiatan sebanyak 3 kegiatan dan diakomodir dalam DPA dan DPPA Badan Kesbangpol Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 sebanyak 1 (satu) kegiatan, yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial. Target kinerja program pendidikan politik masyarakat dengan capaian kinerja program sebesar 80,00%, dan tingkat realisasi capaian kinerja program sebesar 93,75%.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja dan program/kegiatan

Berdasarkan data capaian kinerja program sebagaimana tersebut diatas, secara keseluruhan program program pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota terlaksanan dengan sangat baik.maka terdapat 1 (satu) program yang target kinerjanya tidak tercapai. Kegiatan kegiatan yang tercantum dalam dokumen anggaran dapat dilaksanakan sesuai

dengan jadwal serta t memenuhi target kinerja yang ditetapkan. Dari program-program tersebut hanya satu program yang dengan capaian relative lebih rendah dari capaian yang lain. Program tersebut adalah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Capaian kinerja program ini sangat dipengaruhi oleh konsistensi dan sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran program penunjang. Dimana dalam hal ini, dari 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah, terealisasi sebanyak 18 (delapan belas) sub kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan

Terdapat 5 program pada Renja Badan Kesbangpol Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 yang terpenuhi target kinerjanya. Hal ini diantaranya disebabkan oleh seluruh usulan kegiatan dalam program program tersebut dapat diakomodir seluruhnya dalam DPA dan DPPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022. Kegiatan kegiatan yang tercantum dalam dokumen anggaran dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal serta memenuhi target kinerja yang ditetapkan.

Faktor-Faktor Penyebab melebihi target kinerja program/kegiatan

Dari usulan program dan kegiatan dalam Renja Tahun Anggaran 2022, tidak terdapat Program dan Kegiatan yang melebihi target kinerja.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Badan KesbangPol Tahun 2021 – 2026.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 - 2026 disusun dengan mempedomani RPJMD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 untuk menunjang misi Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota terpilih. Oleh karena itu apabila capaian target program renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak tercapai maka akan menyebabkan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk menunjang misi Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota terpilih tahun 2021 – 2026 akan terganggu.

Kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

Agar target perencanaan jangka menengah dalam Renja Tahunan dan DPA dapat tercapai dengan maksimal, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota perlu menyusun perencanaan dan penganggaran kegiatan dengan memperhatikan dinamika situasi dan kondisi yang berkembang. Selain itu, perencanaan tersebut juga perlu memperhatikan saran dan masukan dari para pihak yang terkait, salah satunya melalui tahapan Forum Perangkat Daerah yang telah dilaksanakan. Penganggaran program kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Tahun 2021 – 2026 tetap dilanjutkan, dan ada sejumlah kebijakan strategis yang diambil untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan pencapaian target kinerja Bidang kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota, diantaranya :

- a. Peringatan Hari Bela Negara dan Rangkaian Peristiwanya perlu dilakukan penekanan dimana tanpa perjuangan dan pengorbanan para pahlawan, kita saat ini bukan siapa-siapa. Perlu pembagian peran dan pendanaan yang jelas dalam pelaksanaan peringatan Hari Bela Negara antara Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Nagari.
- b. Perubahan kewenangan pelaksanaan Paskibra dengan melibatkan TNI, Polri, Dinas Pendidikan dan para pihak lainnya perlu dipersiapkan secara matang oleh Badan Kesbangpol sebagai salah satu langkah membentuk generasi penerus yang siap berkorbar demi bangsa dan negara.
- c. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 dengan melibatkan para pihak antara lain Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan para pihak lainnya perlu lebih ditingkatkan sehingga kualitas kehidupan demokrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota semakin meningkat ditandai dengan tingginya partisipasi pemilih dalam pemilu.
- d. Fasilitasi pemeliharaan kerukunan umat beragama secara berkesinambungan melibatkan Tim FKUB demi menjamin ketertiban dan ketentraman umum masyarakat khususnya terkait dengan

meningkatnya permohonan izin mendirikan rumah ibadah yang berpotensi menimbulkan gesekan di masyarakat.

- e. Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) dengan melibatkan BNN, Kepolisian dan para pihak lainnya perlu lebih diintensifkan dengan memperhatikan bahwa kejadian penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sudah merambah di seluruh kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang berpotensi merusak generasi mendatang.
- f. Peningkatan Deteksi dan Kewaspadaan Dini dengan melibatkan TKDPD menghadapi berkembangnya paham dan aliran menyimpang, aliran radikal dan terorisme yang sudah masuk ke Kabupaten Lima Puluh Kota dan berpotensi mengganggu proses dan hasil pembangunan.
- g. Fasilitasi Forkopimda dan Forkopimcam perlu lebih diperkuat dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi persiapan Pemilu Serentak 2024 yang penuh tantangan.
- h. Membentuk Forum Pembauran Kebangsaan, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.
- i. Pembentukan Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental.

Perkiraan Capaian Kinerja Program Tahun 2024

Berdasarkan laporan realisasi fisik dan keuangan sampai dengan kondisi akhir bulan Desember 2022, capaian program/kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, capaian kinerja program 98,04% dan realisasi keuangan 99,00%,

pada Tahun Anggaran 2024 diperkirakan capaian kinerja program sebesar 98,00%.

- b. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, capaian kinerja program sebesar 91,05% dan realisasi keuangan 99,00%, pada Tahun Anggaran 2024 capaian kinerja program diperkirakan sebesar 91,00%,
- c. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan capaian kinerja program sebesar 99,80% dan realisasi keuangan 89,00%, Tahun Anggaran 2024 capaian kinerja program diperkirakan 99%.
- d. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, capaian kinerja program sebesar 99,54% dan realisasi keuangan 89,00%, pada Tahun Anggaran 2024 capaian kinerja program diperkirakan sebesar 99%.
- e. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, capaian kinerja program sebesar 76,16% dan realisasi keuangan sebesar 89,00%, Tahun Anggaran 2024 capaian kinerja program diperkirakan sebesar 80%.
- f. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, dengan capaian kinerja program sebesar 55,75% dan realisasi keuangan sebesar 90,00%, Tahun Anggaran 2024 capaian kinerja program diperkirakan sebesar 70%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan kewenangannya merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum ini merupakan kewenangan mutlak Presiden RI yang melalui Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2007 dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah. Pelimpahan kewenangan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 dan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019. Lebih lanjut tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah mengalami penyesuaian dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memberikan layanan kepada masyarakat antara lain: 1) pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan; 2) penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi; 3) pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya serta fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang; 4) pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya; 5) fasilitasi organisasi kemasyarakatan; 6) pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di daerah; dan 7) fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah.

Selanjutnya, dalam mengukur kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Akan tetapi, peraturan tersebut tidak menyebut secara spesifik bagaimana kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan umum diukur melalui pemilihan indikator yang relevan. Tidak adanya acuan ini menyebabkan pemilihan indikator kinerja layanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik hanya sebatas asosiasi dengan merujuk kepada indikator yang digunakan pada lembaga/perangkat yang lebih tinggi, misalnya Badan Kesbangpol Propinsi atau Direktorat Jendral terkait di Kementerian Dalam Negeri. Akibat lebih lanjut, karena tidak adanya indikator kinerja yang disepakati bersama, pelaksanaan program kegiatan dan layanan pada Badan Kesbangpol menjadi kurang efektif dan efisien.

Untuk mengisi kekosongan peraturan dalam penetapan indikator kinerja layanan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui Rencana Strategis

Perangkat Daerah telah menetapkan beberapa indikator kinerja yang dianggap sesuai. Meskipun dalam kenyataannya, beberapa indikator tersebut dipakai secara generik untuk semua perangkat daerah dan tidak merepresentasikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara spesifik. Diantara indikator kinerja layanan Badan Kesbangpol yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) antara lain: 1) Indeks Reformasi Birokrasi; 2) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan 3) Indeks Kepuasan Masyarakat.

Pencapaian indikator kinerja daerah yang menggambarkan layanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan Tahun 2022 secara rinci tertuang dalam Tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKU KD	IKD	IKU OPD	Target Renstra Perangkat Daerah / RPJMD				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
						2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	-	58,75 (2023)	58,75 (2023)	58,75	53,33	58,75	64,17	69,58	47,92	53,33	58,75	64,17	69,58	Tercapai
2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	-	67,02 (2023)	67,02 (2023)	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	67,00	67,01	66,00	66,00	66,00	Tercapai
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	89,97 (2023)	89,97 (2023)	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,17	78,39	86,00	86,00	86,00	Tidak Tercapai
4.	Indeks Ketahanan Sosial Budaya	-		-	62,80	62,80	62,80	62,80	62,80	62,80	62,80	62,80	62,80	62,80	Tercapai
5.	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada	-		-	70%	-	-	70%		-	-	-	70%	-	Data Pilkada Serentak 2024

Merujuk kepada Indikator Kinerja Daerah yang telah ditetapkan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memilih beberapa Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang dapat mewakili kinerja layanan pada urusan pemerintahan umum. Capaian Indikator Kinerja Utama ini terbantu dengan hadirnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah, dimana dalam peraturan tersebut, indikator kinerja setiap sub kegiatan telah dicantumkan dengan jelas. Sehingga capaian indikator kegiatan, program sub urusan maupun urusan dapat ditentukan secara linear dengan capaian pada pelaksanaan sub kegiatan.

Terkait dengan pelaksanaan program kegiatan yang mendukung capaian IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, khususnya pada indikator “Persentase fasilitasi penyelesaian konflik sosial”, beberapa hal telah dilakukan pada tahun lalu (2022) sebagai berikut:

- a. Terjadinya penolakan pembangunan jalan tol di 5 (lima) nagari yang berpotensi menimbulkan konflik sosial di Nagari Koto Baru Simalanggang, Koto Tengah Simalanggang, Taeh Baruh, Gurun dan Lubuak Batingkok. Permasalahan ini telah muncul dari tahun 2019 dan sampai dengan saat ini (Desember 2022) belum ada solusi permanen.
- b. Aksi menyegelan Kantor Wali Nagari Koto Tengah Batu Ampa oleh calon wali nagari yang kalah dalam Pilwanag Tahun 2022. Melalui mediasi dan pendekatan Pemerintah Daerah didukung Forkopimda kejadian ini telah diselesaikan secara damai.
- c. Permasalahan Alek Pangulu di Nagari Sungai Kamuyang yang belum bisa dilaksanakan karena masih adanya persoalan terkait dengan Limbago Adat yang belum duduk dan juga adanya masalah lain yang perlu diselesaikan terlebih dahulu, telah difasilitasi penyelesaiannya oleh Pemerintah Daerah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari bersama unsur terkait lainnya).
- d. Kelanjutan adanya kelompok pengajian oleh Yayasan Faiz Albaqorah yang berasal dari Batam yang melakukan pengajian di Nagari Mungo yang diduga dan disinyalir ada kejanggalan sehingga menimbulkan

keresahan di tengah masyarakat. Selanjutnya hal ini telah difasilitasi penyelesaiannya oleh Tim PAKEM Kabupaten Lima Puluh Kota bersama dengan MUI dan Kemenag Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2022.

- e. Pendirian Masjid baru pada kompleks Islamic Center Padang Jopang berpotensi menimbulkan konflik sosial, karena masyarakat jorong menolak pendirian masjid baru dikarenakan masjid lama masih memadai untuk menampung seluruh jemaah jorong. Mediasi telah dilakukan pada medio Oktober 2022 untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dimana pendirian Islamic Center dikembalikan kepada tujuan semula.

Pencapaian IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada indikator Persentase Fasilitasi penyelesaian konflik sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat memenuhi target karena adanya kerja sama yang baik dengan Tim PAKEM, FORKOPIMDA Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, aparatur pemerintahan Kecamatan, Nagari dan Wali Jorong. Selanjutnya, IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nilai IKM tercapai karena adanya pelayanan penerbitan surat keterangan keberadaan (SKK) organisasi kemasyarakatan yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, telah dilakukan pelayanan kepada masyarakat yang akan mengurus surat keterangan keberadaan Organisasi Kemasyarakatan dengan baik.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang merupakan perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum merupakan kewenangan mutlak Presiden RI yang melalui Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2007 dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah. Pelimpahan kewenangan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019.

Diantara urusan yang menjadi kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain: 1) pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan; 2) penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi; 3) pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya serta fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang; 4) pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya; 5) fasilitasi organisasi kemasyarakatan; 6) pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di daerah; dan 7) fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah.

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan umum tersebut, ditetapkan beberapa indikator kinerja pelayanan. Indikator Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota berpedoman pada indikator pelayanan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri yang mengacu pada RPJMN Tahun 2020–2024 (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020). Diantara Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum adalah:

- a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia dengan indikator sasaran strategis sebagai berikut: 1) Indeks demokrasi Indonesia; 2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada; dan 3) Indeks kinerja Ormas.
- b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah, dengan indikator sasaran strategis sebagai berikut: 1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi; 2). Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM); 3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi; dan 4) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
- c. Meningkatnya kewaspadaan nasional, dengan indikator sasaran strategis yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.

2.3.1 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pelayanan pada urusan kesatuan bangsa dan politik. Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi

pada setiap bidang sesuai dengan tupoksi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Permasalahan pada bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan :
 1. Makin hari rasa berbangsa dan bernegara makin “memudar”.
 2. Makin menurunnya moral dari generasi muda khususnya dan masyarakat umumnya.
 3. Sikap dan tindak tanduk masyarakat sudah jauh dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
 4. Dengan adanya otonomi daerah apalagi otonomi pendidikan melemahkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa.
 5. Kurangnya dukungan dan kebijakan pemerintah untuk peningkatan moral bangsa.
 6. Belum terbentuknya lembaga teknis Pusat Pendidikan Kebangsaan di daerah.
 7. Belum terbentuknya Forum Pembauran Kebangsaan.
 8. Belum terbentuknya Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Lima Puluh Kota
- b. Permasalahan pada kewaspadaan dan pembinaan masyarakat :
 1. Karakteristik daerah yang dibangun dalam kondisi yang masih terbatas yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial, politik dan kewilayahan serta rawan akan konflik.
 2. Masih kurangnya kesamaan persepsi dalam kegiatan keagamaan.
 3. Masih lemahnya koordinasi antar lembaga sektoral di bidang kewaspadaan dini.
 4. Masih kurangnya pelaksanaan penyuluhan tentang pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba psikotropika dan zat adiktif lainnya kepada Tokoh Masyarakat maupun generasi muda di kabupaten Lima Puluh Kota.
- c. Permasalahan pada bidang politik dalam negeri :

1. Masih terbatasnya Pendidikan Politik pada masyarakat dan generasi muda
2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat mendaftarkan ormas dan LSM.
3. Belum terhimpunnya seluruh data ormas, parpol dan LSM di Kabupaten Lima Puluh Kota
4. Kurangnya kesadaran pengurus parpol penerima bantuan keuangan dalam penyelesaian administrasi bantuan keuangan parpol.
5. Belum maksimal pelaksanaan monev terhadap keberadaan ormas, parpol dan LSM di Kab. Lima Puluh Kota.
6. Kurangnya partisipasi Ormas/LSM dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada.

2.3.2 Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional/Internasional (NPSK, SPM dan SDGs)

Pembangunan Nasional merupakan upaya seluruh komponen bangsa dalam mencapai tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai penjabaran dari visi, misi, program dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Tahun 2020 - 2024 dan berpedoman pada Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025, disusunlah Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024.

RPJMN Tahun 2020 – 2024 menekankan pada jalan perubahan yaitu jalan ideologis yang bersumber pada Proklamasi, Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Proklamasi dan Pancasila menegaskan jati diri dan identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengamanatkan arah tujuan nasional pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu :

- a. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,
- b. Memajukan kesejahteraan umum,
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap dan terencana dalam tahapan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan.

2.3.3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kendati masih menghadapi permasalahan dan hambatan yang serius, khususnya dalam menangani persoalan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, terdapat sejumlah tantangan maupun peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota secara maksimal. Tantangan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a. Adanya gesekan antar anggota masyarakat maupun antar kelompok masyarakat yang dipicu oleh sumber daya ekonomi (sengketa lahan, sumber daya alam) dan perbedaan persepsi keagamaan.
- b. Menurunnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup berbangsa dan bernegara.
- c. Menurunnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada.
- d. Tingginya jumlah kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan minuman keras di tengah masyarakat.
- e. Adanya krisis kepercayaan terhadap aparat pemerintah.
- f. Belum optimalnya kinerja Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik karena belum lengkapnya peraturan yang mengatur masalah jabatan fungsional.

Sedangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

- a. Adanya dukungan dari pemerintah pusat untuk membangun sistem politik Indonesia yang lebih demokratis, melalui upaya penataan sistem Pemerintahan Daerah, menyempurnakan paket Undang-Undang Politik dan Sistem Pemilukada serentak.
- b. Adanya kesamaan, keterkaitan dan keselarasan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota.

- c. Adanya dukungan dana dari APBD untuk pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota.
- d. Adanya koordinasi dan komunikasi dengan instansi vertikal yang ada di daerah seperti TNI, Kepolisian, Kejaksaan, Kemenkumham, BIN, BNN dan Kementerian Agama.
- e. Adanya dukungan partisipasi masyarakat yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam bentuk kritik, saran dan kerjasama dalam bidang Politik, kesatuan bangsa dan wawasan kebangsaan.

2.3.4 Formulasi Isu-isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan Strategis Untuk Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2024

Dalam rangka mewujudkan stabilitas politik dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa diperlukan tekad dan energi yang besar dan terencana. Keterlibatan seluruh stakeholder dalam penjangkaran informasi dan koordinasi mutlak dilakukan. Dewasa ini kita lihat banyaknya pihak-pihak atau kelompok yang menginginkan adanya perpecahan dengan memicu berbagai konflik. Dalam kerangka pemikiran ini diperlukan analisis dalam merencanakan dan menjalankan strategi. Beberapa isu penting dalam rangka perumusan program dan kegiatan prioritas pada Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pada Tahun 2024 bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, terdapat beberapa isu yang memerlukan perhatian dan fokus pemerintahan daerah :
 - a. Makin hari rasa berbangsa dan bernegara makin “memudar”.
 - b. Makin menurunnya moral dari generasi muda khususnya dan masyarakat umumnya.
 - c. Sikap dan tindak tanduk masyarakat sudah jauh dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

- d. Dengan adanya otonomi daerah apalagi otonomi pendidikan melemahkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa.
 - e. Kurangnya dukungan dan kebijakan pemerintah untuk peningkatan moral bangsa.
 - f. Belum terbentuknya lembaga teknis Pusat Pendidikan Kebangsaan .
 - g. Belum terbentuknya Forum Pembauran Kebangsaan.
 - h. Belum terbentuknya Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Beberapa isu penting yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah pada kewaspadaan dan pembinaan masyarakat pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
- a. Karakteristik daerah yang dibangun dalam kondisi yang masih terbatas yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial, politik dan kewilayahan serta rawan akan konflik.
 - b. Masih kurangnya kesamaan persepsi dalam kegiatan keagamaan.
 - c. Masih lemahnya koordinasi antar lembaga sektoral di bidang kewaspadaan dini.
 - d. Masih kurangnya pelaksanaan penyuluhan tentang pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba psikotropika dan zat adiktif lainnya kepada Tokoh Masyarakat maupun generasi muda di kabupaten Lima Puluh Kota
3. Beberapa isu penting yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah pada bidang politik dalam negeri pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
- a. Masih terbatasnya Pendidikan Politik pada masyarakat dan generasi muda
 - b. Masih kurangnya kesadaran masyarakat mendaftarkan ormas dan LSM.
 - c. Belum terhimpunnya seluruh data ormas, parpol dan LSM di Kabupaten Lima Puluh Kota.

- d. Kurangnya kesadaran pengurus parpol penerima bantuan keuangan dalam penyelesaian administrasi bantuan keuangan parpol.
- e. Belum maksimal pelaksanaan monev terhadap keberadaan ormas, parpol dan LSM di Kab. Lima Puluh Kota.
- f. Belum adanya partisipasi ormas/LSM dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada penyelenggaraan Pemilu dan pemilukada.

Fokus penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten dalam Rencana Kerja Tahun 2024, meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kesadaran bela negara warga negara melalui fasilitasi penyelenggaraan pembinaan ideologi pancasila, wawasan kebangsaan dan karakter kebangsaan masyarakat.
- b. Meningkatkan kehidupan demokrasi melalui peningkatan pendidikan politik masyarakat demi suksesnya pelaksanaan Pemilu dan Pemilu Kepala Daerah serentak pada tahun 2024
- c. Meningkatkan peran aktif organisasi masyarakat dan partai politik dalam pembangunan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
- d. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat melalui Fasilitasi Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Aliran Kepercayaan Masyarakat.
- e. Meningkatkan Peran serta masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam Perang Terhadap Narkoba melalui Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
- f. Meningkatkan stabilitas keamanan di daerah melalui deteksi dan pencegahan dini terhadap ancaman tantangan hambatan dan gangguan yang berpotensi mempengaruhi penyelenggaraan urusan pemerintah.

Dalam mendukung terciptanya stabilitas daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan meningkatkan peran dan fungsi jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengawal stabilitas politik, ekonomi dan keamanan serta meningkatkan kepekaan, kewaspadaan dan kemampuan deteksi dini aparaturnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, beberapa hal perlu diperhatikan antara lain :

- Pemetaan daerah rawan konflik sosial,
- Mewaspadaai isu terorisme/radikalisme,
- Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat,
- Pengawasan terhadap orang asing.

Selain itu, menjadi sangat mendesak pembentukan dan pemberdayaan berbagai forum-forum lintas instansi yang mendukung fungsi dan peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, diantaranya :

- Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA),
- Forum Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (FKDPD),
- Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB),
- Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM),
- Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM),
- Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota,
- Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika,
- Tim Verifikasi/penelitian permohonan pencairan bantuan keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota,
- Tim pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di Kabupaten Lima Puluh Kota.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tahapan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dilakukannya reviu atau peninjauan kembali terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja tersebut adalah untuk menghindari terjadinya

inkonsistensi substansi Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD). Hal ini patut di perhatikan mengingat pada hakikatnya Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan daerah serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD yang disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam melakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD tersebut, beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

Berdasarkan revidi terlihat bahwa beberapa program dan kegiatan mengalami penyesuaian baik secara indikator, target maupun besaran pendanaan. Dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah, maka seluruh indikator kinerja pada Rencana Kerja Tahun 2024 mengalami penyesuaian.

Berdasarkan hasil revidi terdapat tambahan 1 (satu) sub kegiatan yang belum terakomodir dalam Rencana Strategis yaitu Pembentukan dan Penumbuhan Karakter karakter keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara. Penambahan satu sub kegiatan ini dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2020 tentang

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

Pada Rancangan awal Rencana Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik direncanakan melaksanakan 6 (enam) program dengan pagu rencana sebesar Rp 8,582,255,925,00. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis terjadi perubahan kerangka pendanaan terhadap rencana pelaksanaan program tersebut pada Rancangan Rencana Kerja menjadi Rp 71.903.602.259,00. Analisis kebutuhan tersebut salah satunya adalah munculnya belanja bantuan/hibah kepada institusi dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada serentak Tahun 2024. Hibah terkait pemilu tersebut diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp 39.288.464.840,-, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar Rp 21.254.092.000,- dan TNI/Polri sebesar Rp 2.000.000.000,-. Selain itu terdapat hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp 898.831.326,-.

Selanjutnya terdapat penambahan 1 (satu) sub kegiatan dari rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota. Sub kegiatan ini adalah Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibraan dan purnapaskibra. Kegiatan tersebut sebelumnya berada atau diampu oleh perangkat daerah lain, dan terjadi pengalihan kewenangan di Kabupaten Lima Puluh Kota mulai Tahun Anggaran 2024. Sub Kegiatan ini pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 mempunyai target kinerja jumlah laporan hasil pembinaan aktivitas kepaskibraan dan laporan hasil pembinaan purnapaskibra dengan pagu anggaran sebesar Rp 3.000,-.

Hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD secara lengkap disajikan dalam Tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.3 (T-C.31)
Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2024
Badan Kesbangpol Kabupaten Lima Puluh Kota

Kode	Rancangan Awal RKPD (1-6 Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (7-11 SIPD, rancangan)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Badan Kesbangpol	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	4.768.137.351	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Badan Kesbangpol	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	3.010.319.760	
2 11 01 2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	40,207,624	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	14.130.400	
2 11 01 2.01 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun	1	6,121.301	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun	2	13.157.300	
2 11 01 2.01 002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen RKA yang disusun	1	5.624.845	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen RKA yang disusun	-	-	
2 11 01 2.01 003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang disusun	1	5.606.323	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang disusun	-	-	
2 11 01 2.01 004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen DPA yang disusun	1	5.556.931	Koordinasi dan Penyusunan DPA-	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen DPA yang disusun	-	-	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kesbangpol Lima Puluh Kota Tahun 2024

Kode	Rancangan Awal RKPD (1-6 Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (7-11 SIPD, rancangan)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	SKPD					SKPD					
2 11 01 2.01 005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen DPPA yang disusun	1	5.523.856	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen DPPA yang disusun	-	-	
2 11 01 2.01 006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah LKJIP, LKPJ, LPPD, SPIP yang disusun	3	4.037,135	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah LKJIP, LKPJ, LPPD, SPIP yang disusun	3	823.100	
2 11 01 2.01 007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi	1	6.046.661	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi	16	150.000	
2 11 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	3.251.098.887	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	2.422.412.990	
2 11 01 2.02 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Kesbangpol	Jumlah orang bulan yang menerima gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	28	3.212.886.237	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Kesbangpol	Jumlah orang bulan yang menerima gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	32	2.401.142.160	
2 11 01 2.02 003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah dokumen penatausahaan yang tersusun	18	11.518.700	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah dokumen penatausahaan yang tersusun	12	400.0000	
2 11 01 2.02 005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Badan Kesbangpol	Jumlah dokumen keuangan akhir tahun Badan	1	5.907.416	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Badan Kesbangpol	Jumlah dokumen keuangan akhir tahun Badan	1	490.000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kesbangpol Lima Puluh Kota Tahun 2024

Kode	Rancangan Awal RKPD (1-6 Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (7-11 SIPD, rancangan)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kuangan Akhir Tahun SKPD		Kesbangpol			Akhir Tahun SKPD		Kesbangpol			
2 11 01 2.02 007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen laporan SPJ Fungsional dan Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik	24	15.248.898	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen laporan SPJ Fungsional dan Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik	12	20.004.830	
2 11 01 2.02 008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen laporan pronogsis realisasi anggaran	1	5.537.637	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen laporan pronogsis realisasi anggaran	1	376.000	
2 11 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	5.557.703	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	228.000	
2 11 01 2.03 006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daeah pada SKPD	4	5.557.703	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daeah pada SKPD	2	228.000	
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	99.019.725	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	
2.11.01.2.05 002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Badan Kesbangpol	jumlah stel pakaian dinas yang diadakan	40	42.000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Badan Kesbangpol	jumlah stel pakaian dinas yang diadakan	-	-	
2.11.01.2.05 009	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Badan kebangpol	Jumlah kali mengikuti diklat	3	21.498.750	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Badan kebangpol	Jumlah kali mengikuti diklat	-	-	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kesbangpol Lima Puluh Kota Tahun 2024

Kode	Rancangan Awal RKPD (1-6 Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (7-11 SIPD, rancangan)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.11.01.2.05 010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Badan Kesbangpol	Jumlah sosialisasi peraturan perundang undangan	1	20.475.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Badan Kesbangpol	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan	60	32.450.000	
2.11.01.2.05 011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Badan Kesbangpol	Jumlah kali mengikuti Bimtek	3	17.640.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Badan Kesbangpol	Jumlah kali mengikuti Bimtek	-	-	
2 11 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	388.232.366	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	173.420.370	
2 11 01 2.06 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Badan Kesbangpol	Jumlah paket alat listrik yang diadakan	6	11.828.943	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Badan Kesbangpol	Jumlah paket alat listrik yang diadakan	1	6.330.000	
2 11 01 2.06 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Kesbangpol	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	2	33.075.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Kesbangpol	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	-	-	
2 11 01 2.06 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Badan Kesbangpol	Jumlah paket ATK yang diadakan jumlah jenis alat kebersihan yang diadakan	62	32.083.742	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Badan Kesbangpol	Jumlah paket ATK yang diadakan jumlah jenis alat kebersihan yang diadakan	2	32.593.870	
2 11 01 2.06 005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Badan Kesbangpol	Jumlah Jenis Barang yang dicetak Jumlah Lembar Pengadaan	7; 20.030	37.622.372	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Badan Kesbangpol	Jumlah Jenis Barang yang dicetak Jumlah Lembar Pengadaan	2	10.512.500	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kesbangpol Lima Puluh Kota Tahun 2024

Kode	Rancangan Awal RKPD (1-6 Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (7-11 SIPD, rancangan)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2 11 01 2.06 007	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Badan Kesbangpol	Pembelian Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu (porsi)	600	18.191.250	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Badan Kesbangpol	Pembelian Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu (porsi)	12	7.000.000	
2 11 01 2.06 008	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah oh yang mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi	304; 300	255.431.059	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah oh yang mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12	116.984.000	
2 11 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Badan Kesbangpol	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	499.442.320	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Badan Kesbangpol	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	
2 11 01 2.07 002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Badan Kesbangpol	Jumlah Uhit Kendaraan Roda 2 yang diadakan	2	414.100.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Badan Kesbangpol	Jumlah Uhit Kendaraan Roda 2 yang diadakan			-
2 11 01 2.07 005	Pengadaan Mebel	Badan Kesbangpol	Jumlah unit pengadaan mebel	2	21.024.675	Pengadaan Mebel	Badan Kesbangpol	Jumlah kursi tunggu dan kursi tamu yang diadakan	-	-	
2 11 01 2.07 006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Badan Kesbangpol	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	6	64.317.645	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Badan Kesbangpol	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	-	
2 11 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Kesbangpol	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	250.603.211	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Kesbangpol	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	230.768.000	
2 11 01 2.08 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Badan Kesbangpol	Jumlah Buku Cek yang disediakan,	2	4.233.600	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Badan Kesbangpol	Jumlah Buku Cek yang disediakan,	12	1.000.000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kesbangpol Lima Puluh Kota Tahun 2024

Kode	Rancangan Awal RKPD (1-6 Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (7-11 SIPD, rancangan)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah Lembar Materai yang disediakan					Jumlah Lembar Materai yang disediakan			
2 11 01 2.08 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Badan Kesbangpol	Jumlah Kali Pembayaran Rekening Telfon, Listrik, Air, Surat Kabar dan TV berlangganan	12	57.431.430	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Badan Kesbangpol	Jumlah Kali Pembayaran Rekening Telfon, Listrik, Air, Surat Kabar dan TV berlangganan	12	13.768.000	
2 11 01 2.08 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan Kesbangpol	Jumlah bulan pembayaran honor Tenaga Kontrak Khusus dan Tenaga Kontrak Biasa	12	188.938.181	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan Kesbangpol	Jumlah bulan pembayaran honor Tenaga Kontrak Khusus dan Tenaga Kontrak Biasa	12	216.000.000	
2 11 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Kesbangpol	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	229.024.530	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Kesbangpol	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	169.360.000	
2 11 01 2.09 001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Badan Kesbangpol	Jumlah Kali unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)	14	189.949.725	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Badan Kesbangpol	Jumlah Kali unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)	14	165.910.000	
2 11 01 2.09 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Badan Kesbangpol	Jumlah kali unit Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32	20.892.375	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Badan Kesbangpol	Jumlah kali unit Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33	3.450.000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kesbangpol Lima Puluh Kota Tahun 2024

Kode	Rancangan Awal RKPD (1-6 Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (7-11 SIPD, rancangan)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2 11 01 2.09 009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Badan Kesbangpol	Jumlah Paket Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor	1	18.182.430	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Badan Kesbangpol	Jumlah Paket Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor	-	-	
8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase terlaksananya Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	85	1,344.154.691	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase terlaksananya Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	85	3.000	
8 01 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemantapan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	85	1,344.154.691	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemantapan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	85	3.000	
8 01 02 2.01 001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen program kerja yang disusun	1	1.000.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Lima Puluh Kota	-	-	-	
8 01 02 2.01 002	Perumusan	Kab. Lima	Jumlah dokumen SK	1	1.000.000	Perumusan	Kab. Lima	-	-	-	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kesbangpol Lima Puluh Kota Tahun 2024

Kode	Rancangan Awal RKPD (1-6 Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (7-11 SIPD, rancangan)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Puluh Kota	yang disusun			Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Puluh Kota				
8 01 02 2.01 003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah bimtek, sosialisasi, FPK, GNRM	16	857,009,241	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang ideology dan wawasan kebangsaaan (orang)			
8 01 02 2.01 004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Lima Puluh Kota	Peringatan bela negara (lokasi)	8	857,009,241	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi d bidang ideology dan wawasan kebangsaan (orang)			

Kode	Rancangan Awal RKPD (1-6 Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (7-11 SIPD, rancangan)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8 01 02 2.01 005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Lima Puluh Kota	Sosialisasi peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air	35	92,426,640	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah laporan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang ideology dan wawasan kebangsaan			
8 01 02 2.01 006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah keluarga yang mengikuti pembentukan dan penumbuhan karakter	75	21,000,525	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah keluarga yang mengikuti pembentukan dan penumbuhan karakter			
8 01 02 2.01 007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibraan dan purnapaskibra	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah laporan hasil pembinaan aktivitas kepaskibraan dan laporan hasil pembinaan	-	-	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibraan dan purnapaskibra	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah laporan hasil pembinaan aktivitas kepaskibraan dan laporan hasil pembinaan	1	3.000	Sub kegiatan pendukung pelaksanaan Paskibra 2024

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kesbangpol Lima Puluh Kota Tahun 2024

Kode	Rancangan Awal RKPD (1-6 Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (7-11 SIPD, rancangan)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			purnapaskibra					purnapaskibra			
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGA N ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik	85	2,675,000,000	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGA N ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik	85	15.000.000.000	
8 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik	85	2,675,000,000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik	85	15.000.000.000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kesbangpol Lima Puluh Kota Tahun 2024

Kode	Rancangan Awal RKPD (1-6 Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (7-11 SIPD, rancangan)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8 01 03 2.02 001	Penyusunan Progam Kerja Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen rencana kerja yang disusun	2	1.000.000	Penyusunan Progam Kerja Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen rencana kerja yang disusun	-	-	

Kode	Rancangan Awal RKPD (1-6 Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (7-11 SIPD, rancangan)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8 01 03 2.02 002	Penyusunan Bahan Perumusan kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen SK yang disusun	3	1.000.000	Penyusunan Bahan Perumusan kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen SK yang disusun	-	-	
8 01 03 2.02 003	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	13	448,000,000	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan politik	300	14.101.168.679	Berisi pendanaan untuk hibah penyelenggaraan Pemilu 2024

Kode	Rancangan Awal RKPD (1-6 Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (7-11 SIPD, rancangan)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah					Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah					
8 01 03 2.02 004	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah sosialisasi banpol dan verifikasi banpol	1; 10	1,725,000,000	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang pendidikan politik	75	898.831.321	
8 01 03 2.02 005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah bulan dilakukan monitoring Jumlah Kecamatan dilakukan Monitoring	12	500,000,000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik			

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kesbangpol Lima Puluh Kota Tahun 2024

Kode	Rancangan Awal RKPD (1-6 Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (7-11 SIPD, rancangan)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas	85	261.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas			
8 01 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas	85	261.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas			
8 01 04 2.01 001	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen program kerja yang disusun	1	1.000.000	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen program kerja yang disusun	-	-	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kesbangpol Lima Puluh Kota Tahun 2024

Kode	Rancangan Awal RKPD (1-6 Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (7-11 SIPD, rancangan)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					
8 01 04 2.01 002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen SK yang disusun	1	1.000.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen SK yang disusun	-	-	
8 01 04 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah ormas yang terdaftar, dibina dan diawasi	35	261.000,000	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang pemnberdayaan ormas			
8 01 04 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas,	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	12	6.000.000	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas,	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	-	--	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kesbangpol Lima Puluh Kota Tahun 2024

Kode	Rancangan Awal RKPD (1-6 Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (7-11 SIPD, rancangan)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Meningkatnya Kerukunan Umat beragama dan Pengawasan terhadap aliran atau Paham Keagamaan di Masyarakat	85	792,596,290	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Meningkatnya Kerukunan Umat beragama dan Pengawasan terhadap aliran atau Paham Keagamaan di Masyarakat			
8 01 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Meningkatnya Kerukunan Umat beragama dan Pengawasan terhadap aliran atau Paham Keagamaan di Masyarakat	85	792,596,290	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Meningkatnya Kerukunan Umat beragama dan Pengawasan terhadap aliran atau Paham Keagamaan di Masyarakat			
8 01 05 2.01 001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen program kerja yang disusun	1	1.000.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen program kerja yang disusun			

Kode	Rancangan Awal RKPD (1-6 Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (7-11 SIPD, rancangan)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					
8 01 05 2.01 002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen SK yang disusun	2	1.000.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen SK yang disusun			
8 01 05 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah rapat Pakem, FKUB dan penyuluhan Narkotika/P4GN	24	778.596.290	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah rapat Pakem, FKUB dan penyuluhan Narkotika/P4GN			

Kode	Rancangan Awal RKPD (1-6 Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (7-11 SIPD, rancangan)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8 01 05 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	12	6.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ketahanan ekonomi	120	843.350.500	
8 01 05 2.01 005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah monitoring yang dilakukan	12	6.000.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah monitoring yang dilakukan	-	-	
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Meningkatnya	80	334,724,519	PROGRAM PENINGKATAN	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Meningkatnya			

Kode	Rancangan Awal RKPD (1-6 Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (7-11 SIPD, rancangan)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Kamtibmas demi terjaganya Stabilitas Nasional di Daerah			KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Kamtibmas demi terjaganya Stabilitas Nasional di Daerah			
8 01 01 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Meningkatnya Kamtibmas demi terjaganya Stabilitas Nasional di Daerah	80	334,724,519	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Meningkatnya Kamtibmas demi terjaganya Stabilitas Nasional di Daerah			
8 01 06 2.01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen program kerja yang di susun	1	1.000.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen program kerja yang di susun	-	-	

Kode	Rancangan Awal RKPD (1-6 Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (7-11 SIPD, rancangan)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8 01 06 2.01 002	Penyusunan bahan Perumusan Program kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen SK yang disusun	2	1.000.000	Penyusunan bahan Perumusan Program kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen SK yang disusun	-	-	
8 01 06 2.01 003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Rapat TDPD FKDM dan Penangan Konflik sosial	28	328,724,519	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah orang yang melaksanakan kebijakan di bidang kewaspadaan dini			

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kesbangpol Lima Puluh Kota Tahun 2024

Kode	Rancangan Awal RKPD (1-6 Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (7-11 SIPD, rancangan)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					
8 01 06 2.01 004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	12	6.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	-	-	
8 01 06 2.01 005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah monitoring evaluasi dan pelaporan yang dilakukan	12	6.000.0000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah monitoring evaluasi dan pelaporan yang dilakukan	-	-	

Kode	Rancangan Awal RKPD (1-6 Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (7-11 SIPD, rancangan)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					
8 01 06 2.01 006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah	12	856,560,694	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah			
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					11.054.173.545					18.010.3222.760	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat (*bottom-up*). Hal ini sangat penting dilaksanakan karena pada hakekatnya masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Aspirasi masyarakat ini melengkapi pelaksanaan program kegiatan oleh perangkat daerah berdasarkan kebijakan yang lebih tinggi (*top-down*).

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan langsung kepada Perangkat Daerah kabupaten/kota dapat berasal dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan perangkat daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dunia usaha dan para pihak lainnya. Usulan program kegiatan juga dapat berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kabupaten/kota.

Sebagai perangkat daerah pengampu kewenangan dalam urusan pemerintahan umum dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berupaya semaksimal mungkin untuk menampung aspirasi masyarakat dengan berbagai cara dan dalam berbagai kesempatan, termasuk salah satunya pada pelaksanaan Musrenbang, baik di tingkat nagari, kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Lebih dari itu, usulan program dan kegiatan juga dapat berasal dari aspirasi masyarakat yang tersalur melalui reses anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota (Pokok Pikiran). Dalam pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 maupun Forum Perangkat Daerah serta Pokok Pikiran melalui reses Anggota Dewan, aspirasi masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan belum ada yang diarahkan secara khusus kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Tabel 2.4 (T-C.32)

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Program Pembinaan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Nagari Sei Naniang Kecamatan Bukik Barisan	Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	1 kali @ Rp @ Rp 12.760.000,-	
2.	Program Pembinaan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Nagari Taeh Baruah dan Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh	Terlaksananya Sosialisasi P4GN pada zona merah narkoba	2 kali @ Rp 12.760.000,-	
3.	.Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualias dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Jorong Lakuang Nagari Sirujuah Batua Kecamatan Situjuah	Terlaksananya pemberdayaan ex-anggota NII di Nagari Situjuah Batua melalui bantuan mesin jahit	21 unit @ Rp 4.000.000,-	HLbah kepada kelompok masyarakat masyarakat KUBE Cinta Indonesia

Keterangan: Usulan program/kegiatan Badan Kesbangpol Berdasarkan Musrenbang RKPD 2024 di Kecamatan yang dilaksanakan 2-9 Februari 2023, dan usulan melalui pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Badan kesbangpol yang dilaksanakan 27 Februari 2023.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota

3.1.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sasaran utama pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Adapun prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN tersebut meliputi :

1. Pembangunan sumber daya manusia.
2. Pembangunan infrastruktur.
3. Penyederhanaan regulasi.
4. Penyederhanaan Birokrasi.
5. Transformasi Ekonomi.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 prioritas pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan yang diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan yang *pro-growth*, *pro-job*, *pro-poor* dan *pro-environment*. Oleh karena itu perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

harus mengacu dan menguatkan serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional ini.

Berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka prioritas pembangunan nasional yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Prioritas 1 dan 3 yaitu :

- Pembangunan Sumber Daya Manusia.
- Penyederhanaan dan Reformasi Birokrasi.

3.1.2. Telaahan Kebijakan Provinsi Sumatera Barat

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu keberhasilan pembangunan Sumatera Barat juga sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk itu, pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota harus bisa disinkronkan dengan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penyusunan Renja ini, Badan Kesbangpol perlu melakukan telaahan terhadap RPJMD Provinsi Sumatera Barat.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat, maka prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing.
2. Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
3. Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktifitas Produk Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.
4. Meningkatkan Usaha Perdagangan dan industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Digital.
5. Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Daya Saing Kepariwisata.
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.
7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas.

Oleh karena itu perencanaan pembangunan yang disusun oleh Badan Kesbangpol harus disinkronkan dan dapat mendukung pencapaian prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat tersebut. Rencana pembangunan pada Rencana Kerja Badan Kesbangpol Kabupaten Lima Puluh Kota sejalan dengan prioritas pembangunan nomor 7 (tujuh), yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas

3.1.3. Telaahan Kebijakan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 memuat Visi Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu *“Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”*. Selanjutnya untuk mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan beberapa Misi dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berbudaya, dan berdaya saing berlandaskan keimanan.
- b. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan Ekonomi Lintas Sektoral yang memiliki keunggulan di tingkat lokal dan regional.
- c. Mendorong potensi Nagari sebagai poros pembangunan Daerah.
- d. Meningkatkan kualitas layanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya.
- e. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Untuk mewujudkan misi tersebut selanjutnya dituangkan kedalam 10 (sepuluh) agenda prioritas pembangunan antara lain:

1. Peningkatan pembangunan IKK Sarilamak.
2. Peningkatan peran limbago adat.
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas akses jalan daerah, antar daerah dan propinsi.
4. Pembangunan kawasan pinggiran, strategis dan cepat tumbuh.

5. Peningkatan mutu pendidikan.
6. Pariwisata dan peningkatan ekonomi masyarakat.
7. Pengembangan pertanian dan perikanan menuju agribisnis.
8. Pengembalian fungsi kawasan yang berkelanjutan.
9. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
10. Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai perangkat daerah yang berwenang melaksanakan urusan pemerintahan umum, berdasarkan uraian diatas berperan mendukung Misi ke-4 Kepala Daerah terpilih yang lebih lanjut dijabarkan pada agenda prioritas pembangunan nomor 10 (sepuluh). Misi dan agenda prioritas tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas layanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik.

Selanjutnya, Sasaran yang ingin dicapai dalam dokumen Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, selaras dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran bela negara warga negara melalui fasilitasi penyelenggaraan pembinaan ideologi pancasila, wawasan kebangsaan dan karakter kebangsaan.
2. Meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota melalui peningkatan fasilitasi pendidikan politik masyarakat.
3. Terjaganya stabilitas keamanan di daerah melalui deteksi dan pencegahan dini terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang berpotensi mempengaruhi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Penetapan program dan kegiatan Badan Kebangpol untuk Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 mengacu kepada program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Kebangpol Tahun 2021-2026. Renstra tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota. Lebih dari itu Renja Badan Kesbangpol juga disusun selaras dengan RPJM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026.

Selanjutnya penentuan program dan kegiatan dalam Renja Badan Kesbangpol juga wajib mengacu kepada Renca Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, yang telah ditetapkan Kepala Daerah melalui Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 36 Tahun 2022. Adapun Pencantuman nomenklatur program dan kegiatan telah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang merupakan perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum merupakan kewenangan mutlak Presiden RI yang melalui Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2007 dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah. Pelimpahan kewenangan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019.

Diantara urusan yang menjadi kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain: 1) pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan; 2)

penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi; 3) pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya serta fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang; 4) pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya; 5) fasilitasi organisasi kemasyarakatan; 6) pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di daerah; dan 7) fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah.

Berdasarkan Identifikasi Permasalahan untuk penentuan Program Prioritas Kabupaten Lima Puluh Kota untuk urusan/unsur Kesatuan Bangsa dan Politik terdapat satu isu prioritas. Isu tersebut adalah masih rendahnya tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Lima Puluh Kota (63%) dibandingkan partisipasi tingkat Propinsi (76,00%) maupun nasional (70,00%). Identifikasi tersebut tertuang dalam Tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.1 (T-B.36)
Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas
Kabupaten Lima Puluh Kota
Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kesatuan Bangsa dan Politik			
	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilukada	Belum tercapai (<)	Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilukada di Kabupaten Lima Puluh Kota lebih rendah daripada tingkat partisipasi di Propinsi maupun Nasional	Peran aktif para pihak dalam mensukseskan Pemilu Kada melalui Pendidikan politik

Sesuai dengan kewenangan yang diemban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam urusan pemerintahan umum dijabarkan menjadi beberapa program dan kegiatan. Dalam dokumen Rencana Kerja tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota direncanakan melaksanakan 6 (enam) Program Urusan Pemerintahan Umum sebagai berikut:

- a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dengan kegiatan Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
- b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.
- c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
- d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya, dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pematapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

Secara lebih terperinci, penjabaran program, kegiatan dan sub kegiatan urusan pemerintahan umum dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum

No	Program /Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)
I	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.	
	Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. - Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. - Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara.
II	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik. - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik. - Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.
III	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	

	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.	- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
IV	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya.	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
V	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

Selanjutnya, terdapat 1 (satu) program yang merupakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang mencakup 8 (delapan) kegiatan sebagai berikut :

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- c. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah.
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Secara lebih terperinci, penjabaran program kegiatan dan sub kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah disampaikan dalam Tabel 3.4 berikut ini.

Tabel 3.3
Program dan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

No	Program / Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. - Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA SKPD. - Koordinasi dan penyusunan Dok Perubahan RKA OPD. - Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD. - Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA OPD. - Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan gaji dan tunjangan gaji ASN. - Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian dan verifikasi keuangan SKPD. - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD. - Penyusunan dan Pelaporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
	3. Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
	4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya. - Sosialisasi peraturan perundang-undangan.
	5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor. - Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor. - Penyediaan bahan logistik kantor. - Penyediaan barang cetakan dan Pengadaan - Fasilitasi Kunjungan tamu. - Penyelenggaraan rakor dan konsultasi SKPD.
	6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Kendaraan Dinas Ops atau Lapangan. - Pengadaan Mebel. - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
	7. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan jasa surat menyurat. - Penyediaan jasa dan komunikasi Sumber Daya air dan listrik. - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor. - Penyediaan jasa pelayanan umum dan kantor
	8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya, pemeliharaan pajak, dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau

	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Lapangan. - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya. - Pemeliharaan/ rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya
JML	8 Kegiatan	30 Sub Kegiatan

Berdasarkan pengelompokan program dan kegiatan tersebut maka pada Tahun Anggaran 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota pada urusan pemerintahan umum direncanakan melaksanakan 5 (lima) program 5 (lima) kegiatan dan 11 (sebelas) Sub Kegiatan. Untuk mendukung keberhasilan program tersebut, dilaksanakan satu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 9 (sembilan) Kegiatan dan 30 (tiga puluh) Sub kegiatan. Rekapitulasi program kegiatan dan sub kegiatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut ini.

Tabel 3.4

Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kesbangpol Tahun 2024

No	Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	8	25
2	Urusan Pemerintahanan Umum	5	5	11
Jumlah		6	13	36

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 berdasarkan uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja dan target kinerja serta perkiraan maju rencana Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan program dan kegiatan, Rencana Kerja Badan Kesbangpol 2024 terdiri atas sebanyak 6 (enam) program dan 11 (sebelas) kegiatan. Jumlah yang sama juga dijumpai pada perkiraan maju rencana Tahun 2025. Secara lebih lengkap, rencana kerja Perangkat Daerah badan Kesbangpol menurut program dan kegiatan ditampilkan dalam Tabel 4.1 berikut ini:

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2024**

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				1 Dokumen	376.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraa n pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-		5.325.625,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			100 %	228.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraa n pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-	-	5.344.922,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				2 Laporan	228.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraa n pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-		5.344.922,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	0,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	62.349.823,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						00 Paket	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	42.411.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						00 Orang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	19.938.223,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				00 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-		31.808.700,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				00 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-		73.240.592,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	230.768.000,00			-	Pengembangan Masyarakat Madani	-	-	195.511.027,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan Masyarakat Madani	-		3.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	13.768.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-		55.232.627,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				00 Orang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas. Pengembangan Masyarakat Madani	-		759.980.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				00 Orang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan Masyarakat Madani	-		392.524.407,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				00 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas. Pengembangan Masyarakat Madani	-		32.313.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				00 Keluarga	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas. Pengembangan Masyarakat Madani	-		21.205.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				00 Orang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-		213.067.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Meningkatnya Kerukunan Umat beragama dan Pengawasan terhadap aliran atau Paham Keagamaan di Masyarakat	-			85 %	0,00						-	851.615.597,00	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Meningkatnya Kerukunan Umat beragama dan Pengawasan terhadap aliran atau Paham Keagamaan di Masyarakat	-			85 %	0,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-	-	851.615.597,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05.2.01.0004		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				00 Orang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-		851.615.597,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS (DAN FASILITASI) PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Meningkatnya Kamtibmas demi terjaganya Stabilitas Nasional di Daerah	-			85 %	0,00						-	752.364.011,00	

NO	CAPAIAN KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Meningkatnya Kamtibmas demi tergarapnya Stabilitas Nasional di Daerah	-			85 %	0,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ryan Masyarakat Madani	-	-	752.364.011,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				00 Orang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ryan Masyarakat Madani	-		424.539.712,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				00 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ryan Masyarakat Madani	-		327.824.299,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			J U M L A H					18.010.322.760,00							8.804.277.387,00	

Rencana Kebutuhan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 berjumlah total Rp 18.010.322.750,-. Pendanaan tersebut terdiri atas Rp 15.000.003.000,- untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan umum dan Rp 3.010.319.750,- untuk program penunjang urusan pemerintah daerah. Adapun dana indikatif pada prakiraan maju (2025) adalah sebesar Rp 8.633.998.987,-. Pelaksanaan unsur pemerintahan umum meliputi 5 (lima) program dan 5 (lima) kegiatan. Selanjutnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan 1 (satu) program dan 5 (lima) kegiatan. Secara lebih lengkap rekapitulasi rencana kebutuhan pendanaan menurut program dan kegiatan pada rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2

Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan Badan Kesbangpol Tahun 2024

No	Bidang Urusan	Tahun 2024		Tahun 2025	Tahun 2024		Tahun 2025	Ket
		Program			Kegiatan			
		Jumlah	Total Pagu (Rp)	Pagu Indikatif (Rp)	Jumlah	Total Pagu (Rp)	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Unsur Pemerintahan Umum	5	15.000.003.000,-	1.505.441.468,-	5	15.000.003.000,-	8.804.277.387-	
2.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	3.010.319.750,-	3.951.448.572,-	1	3.010.319.750,-	3.951.448.572,-	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Program Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota. Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Badan Kesatuan bangsa dan Politik. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Kesatuan bangsa dan Politik sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini sangat tergantung kepada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Disamping itu, keberhasilan pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut untuk satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumberdaya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan. Diharapkan pada awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun 2024, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Demikian Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2024 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Payakumbuh, Juli 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lima Puluh Kota



H. JONI AM R, S.Sos, MM
NIP. 19650619 199003 1 003

Lampiran :



BUPATI LIMA PULUH KOTA

**KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 905/333/BUP-LK/XII/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DALAM FORMASI JABATAN *EX-OFFICIO***

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 125 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dimana persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan huruf a diatas perlu dibentuk Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 103);
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Formasi Jabatan *Ex-Officio* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tugas secara umum :
 - a. Mengambil langkah-langkah yang tepat dan diperlukan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja tahun 2023;
 - b. Melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja tahun 2023 Perangkat Daerah seperti Forum Perangkat Daerah, dan rapat-rapat lainnya.
 - c. Menyusun dan menyajikan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja tahun 2023, mulai dari Rancangan Awal sampai pada penetapan Renja, sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tugas berdasarkan kedudukan dalam Tim :
 - a. Ketua bertugas mengatur dan memimpin seluruh anggota tim dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - b. Wakil Ketua I bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - c. Wakil Ketua II bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - d. Wakil Ketua III bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - e. Sekretaris bertugas mengecek dan menyiapkan kelengkapan bahan dan seluruh administrasi untuk kelancaran penyusunan dan penulisan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - f. Anggota bertugas menghimpun, mengolah, mengonsep, menyusun, dan menulis serta mengetik naskah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KEEMPAT : Untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Ketua Tim dapat menetapkan

pembagian tugas yang lebih rinci kepada seluruh anggota Tim.

KELIMA

: Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 melalui DPA masing-masing Perangkat Daerah.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 20 Desember 2022



SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 905/333/BUP-LK/XII/2022

TANGGAL : 20 DESEMBER 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM
PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2024 DAN PERUBAHAN RENCANA
KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA DALAM FORMASI JABATAN *EX-
OFFICIO*

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	SEKRETARIAT DAERAH	
	Sekretaris Daerah	Ketua
	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua I
	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan	Wakil Ketua II
	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua III
	Kabag Perencanaan Dan Keuangan	Sekretaris
	Kabag Pemerintahan	Anggota
	Kabag Hukum	Anggota
	Kabag Organisasi	Anggota
	Kabag Administrasi Pembangunan	Anggota
	Kabag Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
	Kabag Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	Anggota
	Kabag Kesejahteraan Rakyat	Anggota
	Kabag Umum	Anggota
	Kabag Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan	Anggota
	Subkoordinator Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Pelaporan	Anggota
	Kasubag Protokol	Anggota
	Subkoordinator Komunikasi Pimpinan	Anggota
	Subkoordinator Dokumentasi Pimpinan	Anggota
	Subkoordinator Kelembagaan Dan Anjab	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Publik Dan Tata Laksana	Anggota
	Subkoordinator Kinerja Dan Reformasi Birokrasi	Anggota
	Subkoordinator Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli Dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Perlengkapan	Anggota
	Subkoordinator Rumah Tangga	Anggota
	Subkoordinator Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	Anggota
	Subkoordinator Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Anggota
	Subkoordinator Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Subkoordinator Penyusunan Program	Anggota
	Subkoordinator Pengendalian Program	Anggota
	Subkoordinator Evaluasi Dan Pelaporan	Anggota
	Subkoordinator Pembinaan BUMD Dan BLUD	Anggota
	Subkoordinator Perekonomian	Anggota
	Subkoordinator Sumber Daya Alam	Anggota
	Subkoordinator Peraturan Perundang-Undangan	Anggota
	Subkoordinator Bantuan Hukum	Anggota
	Subkoordinator Dokumentasi Dan Informasi	Anggota
	Subkoordinator Bina Mental Dan Spiritual	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Administrasi Pemerintahan Dan Kewilayahan	Anggota
	Subkoordinator Otonomi Daerah	Anggota
	Subkoordinator Kerjasama Daerah	Anggota
	Pelaksana pada Sekretariat Daerah	Anggota
2.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	Sekretaris DPRD	Ketua
	Kabag Umum dan Keuangan	Sekretaris
	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Anggota
	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	Anggota
	Subkoordinator Fasilitasi Penganggaran	Anggota
	Subkoordinator Program dan Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Kajian Perundang-Undangan	Anggota
	Subkoordinator Humas, Protokol, dan Publikasi	Anggota
	Subkoordinator Fasilitasi Pengawasan	Anggota
	Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Rumah Tangga	Anggota
	Subkoordinator Persidangan dan Risalah	Anggota
	Subkoordinator Kerjasama dan Aspirasi	Anggota
	Pelaksana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
3.	INSPEKTORAT	
	Inspektur	Ketua
	Sekretariat	Sekretaris
	Inspektur Pembantu Wilayah I	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah II	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah III	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah IV	Anggota
	Inspektur Pembantu Pengawasan Tertentu	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Subkoordinator Perencanaan	Anggota
	Subkoordinator Analisis Dan Evaluasi	Anggota
	Kasubag Administrasi Umum Dan Keuangan	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat	Anggota
	Pelaksana pada Inspektorat	Anggota
4.	DINAS KESEHATAN	
	Kepala Dinas Kesehatan	Ketua
	Sekretaris Dinas Kesehatan	Sekretaris 1
	Direktur RSUD dr. Achmad Darwis	Sekretaris 2
	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Anggota
	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Anggota
	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Anggota
	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi, Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Keuangan dan Pengelolaan Aset	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Alat Kesehatan dan Fasyankes	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Kefarmasian dan Perizinan	Anggota
	Subkoordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan	Anggota
	Subkoordinator Surveilans, Imunisasi dan Penanggulangan Krisis Kesehatan	Anggota
	Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Anggota
	Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Nafza	Anggota
	Subkoordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Anggota
	Subkoordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Primer	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pelayanan Kesehatan Haji, dan Jaminan Kesehatan	Anggota
	Subkoordinator Peningkatan Mutu dan Akreditasi, dan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Anggota
	Kabag Tata Usaha RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Kabid Perencanaan Pelaporan Sarana Prasarana dan Logistik RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Kabid Pelayanan Penunjang dan Promosi Kesehatan RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Kabid Pelayanan Medis dan Keperawatan RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Subkoordinator Sarana Prasarana Dan Logistik RSUD dr Achmad Darwis	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Subkoordinator Perencanaan Dan Pelaporan RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Penunjang Medis RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Penunjang Non Medis Dan Promosi Kesehatan RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Medis RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Perawatan RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Kasubag Keuangan RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Kasubag Umum dan Humas RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Kasubag Kepegawaian Dan Pengembangan SDM RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Kesehatan	Anggota
	Pelaksana pada RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
5.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua
	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretaris
	Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar	Anggota
	Kabid Pembinaan PAUD dan PNF	Anggota
	Kabid Pembinaan Ketenagaan	Anggota
	Kabid Kebudayaan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
	Subkoordinator Keuangan dan BMD	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Kurikulum dan Penilaian	Anggota
	Kasi Peserta Didik dan Pendidikan Karakter	Anggota
	Subkoordinator Kelembagaan dan Sarana Prasana	Anggota
	Kasi Kurikulum, Penilaian dan Peserta Didik	Anggota
	Subkoordinator Kelembagaan dan Sarana Prasarana	Anggota
	Kasi Pendidikan Non Formal	Anggota
	Subkoordinator PTK PAUD dan PNF	Anggota
	Kasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SD	Anggota
	Kasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SMP	Anggota
	Subkoordinator Cagar Budaya dan Permuseuman	Anggota
	Subkoordinator Sejarah dan Nilai Tradisi	Anggota
	Subkoordinator Kesenian	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
6.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua
	Sekretaris Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris
	Kepala Bidang Bina Marga	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kepala Bidang Cipta Karya	Anggota
	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Anggota
	Kepala Bidang Jasa Konstruksi	Anggota
	Kepala Bidang Tata Ruang	Anggota
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Bagian Program dan Pelaporan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi Sumber Daya Air	Anggota
	Subkoordinator Pelaksanaan Sumber Daya Air	Anggota
	Subkoordinator Operasi dan pemeliharaan Sumber Daya Air	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi Bina Marga	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan	Anggota
	Subkoordinator Preservasi Jalan dan Jembatan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan Jasa Konstruksi	Anggota
	Subkoordinator Pembinaan dan Pemberdayaan	Anggota
	Subkoordinator Pemantauan Dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan dan Tata Ruang	Anggota
	Subkoordinator Pemanfaatan dan pengendalian	Anggota
	Kasi Pertanahan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi Cipta Karya	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman	Anggota
	Subkoordinator Tata Bangunan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
7.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	Kepala Satpol PP	Ketua
	Sekretaris Satpol PP	Sekretaris
	Kepala Bidang Trantib	Anggota
	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	Anggota
	Kepala Bidang PPUD	Anggota
	Kepala Bidang SDA	Anggota
	Kasubag Program & Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum & Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Intelijen	Anggota
	Kasi Trantib & Pengamanan	Anggota
	Kasi Operasional & Logistik	Anggota
	Kasi Bina Potensi	Anggota
	Subkoordinator Data Informasi	Anggota
	Kasi Satlinmas dan Pengaduan Masyarakat	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Subkoordinator Kerjasama Antar Lembaga	Anggota
	Kasi Penegakan	Anggota
	Kasi Pembinaan Pengawasan & Penyuluhan	Anggota
	Kasi Pelatihan Dasar	Anggota
	Subkoordinator Teknis Fungsional	Anggota
	Kasi Tindak Internal	Anggota
	Pelaksana pada Satpol PP	Anggota
8.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran	Ketua
	Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran	Sekretaris
	Kabid Pencegahan	Anggota
	Kabid Pemadam Dan Penyelamatan	Anggota
	Kabid Sarana Dan Prasarana	Anggota
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Perencanaan Dan Keuangan	Anggota
	Kasi Pencegahan Dan Inspeksi	Anggota
	Kasi Peningkatan Kapasitas Aparatur	Anggota
	Subkoordinator Pemberdayaan Masyarakat Dan Dunia Usaha	Anggota
	Subkoordinator Pengendalian Operasi Dan Komunikasi	Anggota
	Kasi Pemadam Dan Investigasi	Anggota
	Kasi Penyelamatan Dan Evakuasi	Anggota
	Kasi Pengadaan Sarana Dan Prasarana	Anggota
	Kasi Pemeliharaan Dan Perawatan Sarana Prasarana	Anggota
	Subkoordinator Informasi Dan Pengelolaan Data	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pemadam Kebakaran	Anggota
9.	DINAS SOSIAL	
	Kepala Dinas Sosial	Ketua
	Sekretaris Dinas Sosial	Sekretaris
	Kabid Rehabilitasi Sosial	Anggota
	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
	Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Subkoordinator Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia	Anggota
	Subkoordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Anggota
	Subkoordinator Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, Korban Nafza dan Korban Perdagangan Orang	Anggota
	Subkoordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Subkoordinator Perlindungan Sosial bagi Korban Tindak Kekerasan dan Orang Terlantar	Anggota
	Subkoordinator Jaminan Sosial Keluarga	Anggota
	Subkoordinator Identikasi dan Penguatan Kapasitas	Anggota
	Subkoordinator Pemberdayaan Masyarakat dan Penyaluran Bantuan Stimulan	Anggota
	Subkoordinator Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Sosial	Anggota
10.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
	Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Identitas Penduduk	Anggota
	Subkoordinator Pindah Datang Penduduk	Anggota
	Subkoordinator Pendataan Penduduk	Anggota
	Subkoordinator Kelahiran	Anggota
	Subkoordinator Perkawinan dan Perceraian	Anggota
	Subkoordinator Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian	Anggota
	Subkoordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
	Subkoordinator Pengolahan dan Penyajian Data	Anggota
	Subkoordinator Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi	Anggota
	Subkoordinator Kerjasama	Anggota
	Subkoordinator Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Anggota
	Subkoordinator Inovasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
11.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	Kepala DPPKBPPPA	Ketua
	Sekretaris DPPKBPPPA	Sekretaris
	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Penggerakan	Anggota
	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	Anggota
	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Pengendalian Penduduk	Anggota
	Subkoordinator Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Subkoordinator Penyuluhan, Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Anggota
	Subkoordinator Advokasi dan Penggerakan	Anggota
	Subkoordinator Pengendalian dan Pendistribusian Alokasi	Anggota
	Subkoordinator Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi	Anggota
	Subkoordinator Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum	Anggota
	Subkoordinator Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi	Anggota
	Subkoordinator Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan	Anggota
	Subkoordinator Pemenuhan Hak Anak, Data dan Informasi Anak	Anggota
	Subkoordinator Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasan Anak	Anggota
	Pelaksana pada DPPKBPPPA	Anggota
12.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	Kepala DPMPTSP	Ketua
	Sekretaris DPMPTSP	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Terpadu	Anggota
	Kabid Promosi	Anggota
	Kabid Perencanaan dan Pengembangan	Anggota
	Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Keuangan dan BMD	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Perizinan Umum	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Perizinan Umum Penanaman Modal	Anggota
	Subkoordinator Fasilitasi Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Lainnya	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Subkoordinator Promosi	Anggota
	Subkoordinator Sarana dan Prasarana Promosi	Anggota
	Subkoordinator Data dan Informasi	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan Potensi dan Peluang Investasi	Anggota
	Subkoordinator Penyuluhan Penanaman Modal	Anggota
	Subkoordinator Regulasi Penanaman Modal	Anggota
	Subkoordinator Pemantauan Penanaman Modal	Anggota
	Subkoordinator Pembinaan Penanaman Modal	Anggota
	Subkoordinator Pengawasan Penanaman Modal	Anggota
	Pelaksana pada DPMPTSP	Anggota
13.	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH	
	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi UKM	Ketua
	Sekretaris Perdagangan, Koperasi UKM	Sekretaris
	Kepala Bidang Fasilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan	Anggota
	Kepala Bidang Kemetrolagian dan Pengawasan Perdagangan	Anggota
	Kepala Bidang Kelembagaan & Pengawasan Koperasi	Anggota
	Kepala Bidang Pemberdayaan & Pengembangan Koperasi & Usaha Mikro	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
	Subkoordinator Kelembagaan dan perizinan	Anggota
	Subkoordinator Peningkatan kualitas SDM koperasi & kewirausahaan	Anggota
	Subkoordinator Metrologi	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Jaringan Perdagangan	Anggota
	Subkoordinator Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan	Anggota
	Subkoordinator Sarana Distribusi dan Stabilitas Barang Pokok dan Penting	Anggota
	Subkoordinator Pengawasan Perizinan dan Pendaftaran	Anggota
	Subkoordinator Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Anggota
	Subkoordinator Keanggotaan dan Penerapan Peraturan	Anggota
	Subkoordinator Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penilaian Kesehatan Koperasi	Anggota
	Subkoordinator Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	Anggota
	Subkoordinator Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perdagangan, Koperasi UKM	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
14.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Ketua
	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sekretaris
	Kabid Pembinaan dan Pengawasan Industri	Anggota
	Kabid Sarana dan Prasarana Industri	Anggota
	Kabid Ketenagakerjaan	Anggota
	Kabid Transmigrasi	Anggota
	Subkoordinator Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Pembinaan Industri Agro	Anggota
	Subkoordinator Pembinaan Industri Non Agro	Anggota
	Subkoordinator Pengawasan, Sertifikasi dan Standarisasi Industri	Anggota
	Subkoordinator Perizinan dan Data	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan teknologi Industri	Anggota
	Subkoordinator Promosi dan Pemasaran	Anggota
	Subkoordinator Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja	Anggota
	Subkoordinator Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Anggota
	Subkoordinator Perlindungan Tenaga Kerja	Anggota
	Subkoordinator Penempatan Transmigrasi	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Anggota
	Subkoordinator Informasi dan Pembinaan SDM Transmigrasi	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Anggota
15.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	Kepala Diskominfo	Ketua
	Sekretaris Diskominfo	Sekretaris
	Kabid Komunikasi Publik	Anggota
	Kabid Aplikasi Informatika	Anggota
	Kabid Statistik dan Pelayanan Informasi Publik	Anggota
	Kabid Persandian Dan Manajemen Data Elektronik	Anggota
	Subkoordinator Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Monitoring Opini Dan Aspirasi Publik	Anggota
	Subkoordinator Pengelola Media Komunikasi Publik	Anggota
	Subkoordinator Layanan Hubungan Media Dan Kehumasan	Anggota
	Subkoordinator Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Subkoordinator Infrastruktur Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Anggota
	Subkoordinator Aplikasi	Anggota
	Subkoordinator Statistik Sektor Ekonomi Dan Infastruktur	Anggota
	Subkoordinator Statistik Sektor Pemerintahan Dan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Informasi Publik	Anggota
	Subkoordinator Identifikasi Deteksi Dan Proteksi Keamanan SIBER	Anggota
	Subkoordinator Penanggulangan Pemulihan Pemantauan Dan Pengendalian	Anggota
	Subkoordinator Manajemen Data Elektronik	Anggota
	Pelaksana pada Diskominfo	Anggota
16.	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Ketua
	Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Sekretaris
	Subkoordinator Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Keuangan	Anggota
	Kabid Pariwisata	Anggota
	Subkoordinator Promosi dan Informasi	Anggota
	Subkoordinator Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata	Anggota
	Subkoordinator Kemitraan dan Kerjasama Antar Lembaga	Anggota
	Kabid Pemuda	Anggota
	Subkoordinator Peningkatan Kreatifitas Kewirausahaan Pemuda	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Kompetensi Pemuda	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Anggota
	Kabid Olahraga	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Olah Raga Pendidikan	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Olah Raga Prestasi	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Olah Raga Rekreasi dan Tradisi	Anggota
	Kabid Sarana Prasarana dan Pengembangan SDM	Anggota
	Subkoordinator Sarana Prasarana Pariwisata	Anggota
	Subkoordinator Sarana Prasarana Pemuda Olah Raga	Anggota
	Subkoordinator Pendataan dan Pengembangan SDM	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
17.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI	
	Kepala DPMD/N	Ketua
	Sekretaris DPMD/N	Sekretaris
	Kabid Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kabid Pemerintahan Nagari	Anggota
	Kabid Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Ketahanan dan Partisipasi Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Pemberdayaan Adat, Sosial Budaya dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Subkoordinator Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Kawasan Nagari, SDA dan TTG	Anggota
	Subkoordinator Pemberdayaan Aparatur dan Lembaga Pemerintahan Nagari	Anggota
	Subkoordinator Administrasi Produk Hukum Nagari dan Kerjasama antar Nagari	Anggota
	Subkoordinator Organisasi Pemerintahan Nagari	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan Keuangan Nagari	Anggota
	Subkoordinator Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Nagari	Anggota
	Subkoordinator Aset dan Kekayaan Nagari	Anggota
	Pelaksana pada DPMD/N	Anggota
18.	DINAS PERHUBUNGAN	
	Kepala Dinas Perhubungan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perhubungan	Sekretaris
	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Anggota
	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Anggota
	Kepala Bidang Prasarana	Anggota
	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Lalu Lintas	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan dan Pembangunan Prasarana	Anggota
	Kasi Pengujian Sarana	Anggota
	Kasi Angkutan	Anggota
	Kasi Pengoperasian Prasarana	Anggota
	Kasi Perawatan Prasarana	Anggota
	Subkoordinator Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan	Anggota
	Kasi Lingkungan Perhubungan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Keselamatan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Anggota
19.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN	
	Kepala DLHPP	Ketua
	Sekretaris DLHPP	Sekretaris
	Kabid Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
	Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan	Anggota
	Kabid Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup	Anggota
	Kabid Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Program dan Pelaporan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
	Subkoordinator Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup	Anggota
	Subkoordinator Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
	Subkoordinator Operasional Penanganan Sampah	Anggota
	Subkoordinator Pengelolaan Limbah dan Sampah	Anggota
	Subkoordinator Pertamanan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Anggota
	Subkoordinator Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Anggota
	Subkoordinator Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup	Anggota
	Subkoordinator Penataan Hukum Lingkungan Hidup	Anggota
	Subkoordinator Perumahan	Anggota
	Subkoordinator Kawasan Permukiman	Anggota
	Subkoordinator Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Anggota
	Analisis Lingkungan Hidup	Anggota
	Analisis Sistem Mutu dan Lingkungan	Anggota
	Pelaksana pada DLHPP	Anggota
20.	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
	Kepala Distanhorbun	Ketua
	Sekretaris Distanhorbun	Sekretaris
	Kabid Sarana	Anggota
	Kabid Prasarana	Anggota
	Kabid Perlindungan Tanaman Dan Perizinan Usaha	Anggota
	Kabid penyuluhan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Subkoordinator Keuangan Dan Aset	Anggota
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Pupuk Dan Pestisida	Anggota
	Subkoordinator Sumber Daya Genetik	Anggota
	Subkoordinator Alat Dan Mesin Pertanian	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Prasarana	Anggota
	Subkoordinator Irigasi	Anggota
	Subkoordinator Infrastruktur Pertanian	Anggota
	Subkoordinator Perlindungan Tanaman	Anggota
	Subkoordinator Penanganan Dampak Perubahan Iklim Dan Bencana Alam	Anggota
	Subkoordinator Perizinan Dan Pembinaan Usaha	Anggota
	Subkoordinator Kelembagaan	Anggota
	Subkoordinator Ketenagaan	Anggota
	Subkoordinator Penyelenggaraan Penyuluhan	Anggota
	Pelaksana pada Distanshorbun	Anggota
21.	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ketua
	Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Sekretaris
	Kabid Perbibitan dan Produksi	Anggota
	Kabid Keswan,Kesmavet,Pengolahan dan Pemasaran	Anggota
	Kabid. Sarana dan Prasarana	Anggota
	Kabid Penyuluhan	Anggota
	Subkoordinator Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Non Ruminansia	Anggota
	Subkoordinator Ruminansia	Anggota
	Subkoordinator Perbibitan	Anggota
	Subkoordinator Kesmavet	Anggota
	Subkoordinator Kesehatan Hewan	Anggota
	Subkoordinator Pengolahan dan Pemasaran	Anggota
	Subkoordinator Pakan	Anggota
	Subkoordinator Pembiayaan dan Investasi	Anggota
	Subkoordinator Lahan dan Irigasi	Anggota
	Subkoordinator Kelembagaan	Anggota
	Subkoordinator Metode dan Infomasi	Anggota
	Subkoordinator Ketenagaan	Anggota
	Pelaksana pada Disnakkeswan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
22.	DINAS PERIKANAN	
	Kepala Dinas Perikanan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perikanan	Sekretaris
	Kabid Pengembangan Sumberdaya Perikanan	Anggota
	Kabid Pemberdayaan Usaha Perikanan	Anggota
	Kabid Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Pengelolaan Kawasan Budidaya, Tata Pemanfaatan Air, Lahan dan Pelestarian Plasma Nutfah	Anggota
	Subkoordinator Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Anggota
	Subkoordinator Pengendalian Mutu Pembudiyaan Ikan	Anggota
	Subkoordinator Sarana dan Prasarana Perikanan	Anggota
	Subkoordinator Jaminan Perlindungan Usaha Perikanan	Anggota
	Subkoordinator Penguatan Daya Saing Usaha Perikanan	Anggota
	Subkoordinator Peningkatan SDM Pelaku Usaha Perikanan	Anggota
	Subkoordinator Kemitraan Usaha dan Fasilitasi Perizinan Perikanan	Anggota
	Subkoordinator Kelembagaan, Pendampingan dan Koordinasi Penyuluhan Perikanan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perikanan	Anggota
23.	DINAS PANGAN	
	Kepala Dinas Pangan	Ketua
	Sekretaris Dinas Pangan	Sekretaris
	Kabid Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
	Kabid Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Ketersediaan Pangan	Anggota
	Subkoordinator Distribusi dan Harga Pangan	Anggota
	Subkoordinator Kerawanan Pangan	Anggota
	Subkoordinator Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Pangan Lokal	Anggota
	Subkoordinator Keamanan Pangan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pangan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
24.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sekretaris
	Kabid Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kabid Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kabid Pembinaan dan Pengawasan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Subkoordinator Deposit dan Pelestarian Bahan Pustaka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Subkoordinator Promosi dan Layanan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan, Pengolahan Bahan Pustaka dan TIK Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Subkoordinator Arsip Dinamis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Subkoordinator Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Subkoordinator Arsip Statis dan Layanan Informasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Subkoordinator Pembinaan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Subkoordinator Pembinaan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Subkoordinator Pengawasan Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Fungsional Pustakawan	Anggota
	Fungsional Kearsipan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pustaka dan Kearsipan	Anggota
25.	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	Kepala Bapelitbang	Ketua
	Sekretaris Bapelitbang	Sekretaris
	Kabid Ekonomi Penelitian dan Pengembangan	Anggota
	Kabid SDM, Sosbud dan Pemerintahan Bapelitbang	Anggota
	Kabid Perencanaan, Data, Pengendalian dan Evaluasi Bapelitbang	Anggota
	Kabid Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Program Bapelitbang	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Keuangan Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Pertanian dan Perikanan Bapelitbang	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Subkoordinator Perindustrian, Perdagangan, UMK, Penanaman Modal dan Pariwisata Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan dan Pendanaan Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Sosial Budaya Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Sumber Daya Manusia Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Infrastruktur Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Wilayah Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Lingkungan Hidup Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Data dan Informasi Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang	Anggota
	Pelaksana pada Bapelitbang	Anggota
26.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	
	Kepala BKPSDM	Ketua
	Sekretaris BKPSDM	Sekretaris
	Kabid Pendidikan, Pelatihan dan Penilaian Kinerja ASN	Anggota
	Subkoordinator Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Teknis	Anggota
	Subkoordinator Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Manajerial ASN	Anggota
	Subkoordinator Pendidikan dan Penilaian Kinerja ASN	Anggota
	Kabid Pengembangan dan Disiplin ASN	Anggota
	Subkoordinator Kepangkatan	Anggota
	Subkoordinator Mutasi	Anggota
	Subkoordinator Disiplin ASN	Anggota
	Kabid Informasi Pengadaan dan Status PNS	Anggota
	Subkoordinator Status ASN	Anggota
	Subkoordinator Informasi ASN	Anggota
	Subkoordinator Formasi dan Pengadaan ASN	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Pelaksana pada BKPSDM	Anggota
27.	BADAN KEUANGAN	
	Kepala Badan Keuangan	Ketua
	Sekretaris Badan Keuangan	Sekretaris
	Subkoordinator Program dan Pelaporan	Anggota
	Subkoordinator Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kabid Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasubid 1 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Subkoordinator 2 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kabid Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Subkoordinator 1 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Subkoordinator 1 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Subkoordinator 2 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kabid Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Subkoordinator 1 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Subkoordinator 2 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Pelaksana pada Badan Keuangan	Anggota
28.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Ketua
	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Sekretaris
	Kabid Ideologi Dan Wasbang	Anggota
	Kabid Politik Dalam Negeri	Anggota
	Kabid Kewaspadaan Dan Pembinaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Bina Ideologi	Anggota
	Subkoordinator Bina Wasbang	Anggota
	Subkoordinator Bintang, Eksosbud Dan Agama	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Subkoordinator Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Dini	Anggota
	Subkoordinator HAL Dan Fasilitas Pemilu	Anggota
	Subkoordinator Fasilitas Parpol Dan Ormas	Anggota
	Pelaksana pada Badan Kesbangpol	Anggota
29.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	Kepala Pelaksana BPBD	Ketua
	Sekretaris BPBD	Sekretaris
	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Anggota
	Kabid Kedaruratan dan Logistik	Anggota
	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Pencegahan	Anggota
	Subkoordinator Kesiapsiagaan	Anggota
	Subkoordinator Kedaruratan	Anggota
	Subkoordinator Logistik	Anggota
	Subkoordinator Rehabilitasi	Anggota
	Subkoordinator Rekonstruksi	Anggota
	Pelaksana pada BPBD	Anggota
30.	KECAMATAN GUGUAK	
	Camat Guguak	Ketua
	Sekretaris Camat Guguak	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Guguak	Anggota
31.	KECAMATAN PAYAKUMBUH	
	Camat Payakumbuh	Ketua
	Sekretaris Camat Payakumbuh	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Payakumbuh	Anggota
32.	KECAMATAN MUNGKA	
	Camat Mungka	Ketua
	Sekretaris Camat Mungka	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Mungka	Anggota
33.	KECAMATAN SULIKI	
	Camat Suliki	Ketua
	Sekretaris Camat Suliki	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Suliki	Anggota
34.	KECAMATAN BUKIK BARISAN	
	Camat Bukik Barisan	Ketua
	Sekretaris Camat Bukik Barisan	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Bukik Barisan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
35.	KECAMATAN GUNUANG OMEH	
	Camat Gunuang Omeh	Ketua
	Sekretaris Camat Gunuang Omeh	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Gunuang Omeh	Anggota
36.	KECAMATAN LUAK	
	Camat Luak	Ketua
	Sekretaris Camat Luak	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Luak	Anggota
37.	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN	
	Camat Lareh Sago Halaban	Ketua
	Sekretaris Camat Lareh Sago Halaban	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Lareh Sago Halaban	Anggota
38.	KECAMATAN HARAU	
	Camat Harau	Ketua
	Sekretaris Camat Harau	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Harau	Anggota
39.	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI	
	Camat Situjuah Limo Nagari	Ketua
	Sekretaris Camat Situjuah Limo Nagari	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Situjuah Limo Nagari	Anggota
40.	KECAMATAN AKABILURU	
	Camat Akabiluru	Ketua
	Sekretaris Camat Akabiluru	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Akabiluru	Anggota
41.	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	
	Camat Pangkalan Koto Baru	Ketua
	Sekretaris Camat Pangkalan Koto Baru	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Anggota
42.	KECAMATAN KAPUR IX	
	Camat Kapur IX	Ketua
	Sekretaris Camat Kapur IX	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Kapur IX	Anggota

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 20 Desember 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah ini disusun mengacu pada RPJMD tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 masing-masing Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada tahun yang akan datang.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan personil Perangkat Daerah. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Perangkat Daerah, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Perangkat Daerah dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumber daya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan.

Diharapkan pada awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun 2024, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Demikian Renja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

